



INTEGRA
GROUP

**Laporan Keuangan Konsolidasian Interim
Yang Tidak Diaudit
Tanggal 30 September 2019**

**PT Integra Indocabinet Tbk
Dan Entitas Anaknya**

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA

Laporan keuangan konsolidasian interim yang tidak diaudit

Tanggal 30 September 2019

**dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal
tersebut**

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

**PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS
ANAKNYA**

Laporan keuangan konsolidasian interim yang tidak
diaudit

Tanggal 30 September 2019

dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Mata Uang Rupiah Indonesia)

Daftar Isi	Halaman
Surat Pernyataan Direksi	
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian <i>Interim</i> tidak diaudit	1
Laporan Laba Rugi Konsolidasian <i>Interim</i> tidak diaudit	2
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian <i>Interim</i> tidak diaudit	3
Laporan Arus Kas Konsolidasian <i>Interim</i> tidak diaudit	4
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian <i>Interim</i> tidak diaudit	5 - 52

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019 DAN 2018
PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA**

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Nama | : Halim Rusli |
| Alamat Kantor | : Desa Betro RT 013, RW 007
Betro, Sedati
Sidoarjo |
| Alamat Domisili | : Jl. Margorejo Indah B-825
Kec. Wonocolo-Surabaya |
| Nomor Telepon | : (62-31) 8911209 |
| Jabatan | : Direktur Utama |
| 2. Nama | : Wang Sutrisno |
| Alamat Kantor | : Desa Betro RT 013, RW 007
Betro, Sedati
Sidoarjo |
| Alamat Domisili | : Jl. Kertajaya Indah Timur 17/56
Kec. Sukolilo-Surabaya |
| Nomor Telepon | : (62-31) 8911209 |
| Jabatan | : Direktur |

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Integra Indocabinet Tbk dan Entitas Anaknya;
2. Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan konsolidasian tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Sidoarjo, 28 Oktober 2019
Atas nama dan mewakili Direksi

 	
Halim Rusli Direktur Utama	Wang Sutrisno Direktur

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA

Laporan keuangan konsolidasian interim yang tidak diaudit
Tanggal 30 September 2019
dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal
tersebut
(Mata Uang Rupiah Indonesia)

	30 September 2019	Catatan/	31 Desember 2018
	Tidak diaudit	Notes	Diaudit
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	50.034.331.087	2, 5, 25	64.166.199.514
Piutang usaha			
Pihak ketiga, bersih	474.697.590.292	2, 6, 25	460.193.696.037
Piutang lain-lain			
Pihak ketiga	65.689.717.288	2, 7	120.174.917.332
Persediaan	1.768.456.444.008	2, 8	1.431.982.994.727
Pajak dibayar di muka	112.861.328.844	2, 9	69.758.123.129
Biaya dibayar di muka	10.626.538.451	2	11.687.573.277
Uang muka pembelian	228.353.948.936	2, 10	164.364.245.201
Taksiran tagihan pajak	3.689.062.500	2	3.689.062.500
Jumlah Aset Lancar	2.714.408.961.406		2.326.016.811.717
ASET TIDAK LANCAR			
Uang muka pembelian	338.337.213.954	2, 10	296.472.940.692
Aset pajak tangguhan	7.453.231.367	2	7.453.231.366
Properti investasi	-		-
Investasi	20.044.000.000	2	18.870.000.000
Aset tetap - bersih	2.065.735.620.514	2, 11	1.932.994.555.038
Aset lain-lain - bersih	8.674.204.655	2, 12	6.689.868.597
Jumlah Aset Tidak Lancar	2.440.244.270.490		2.262.480.595.693
JUMLAH ASET	5.154.653.231.896		4.588.497.407.410

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian *Interim* yang tidak diaudit terlampir merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian *Interim* yang tidak diaudit ini secara keseluruhan.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA

Laporan keuangan konsolidasian interim yang tidak diaudit
Tanggal 30 September 2019
dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal
tersebut
(Mata Uang Rupiah Indonesia)

	30 September 2019	Catatan/ Notes	31 Desember 2018
	Tidak diaudit		Tidak diaudit
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang bank dan lembaga keuangan bukan bank	1.845.762.306.693	2, 13, 25	1.595.453.817.607
Utang usaha Pihak ketiga	81.960.595.457	2, 14, 25	77.142.451.785
Utang lain-lain Pihak ketiga	2.305.824.241	2, 15	15.302.676.755
Beban akrual	20.258.600.237	2	10.227.961.858
Utang pajak	39.389.507.590	2, 16	61.566.724.051
Uang muka pelanggan	862.543.318	2, 17	21.672.720.394
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun :			
Utang bank dan lembaga keuangan bukan bank	33.825.016.364	2, 13	38.330.004.655
Utang sewa pembiayaan	7.050.982.534		14.508.888.283
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	2.031.415.376.434		1.834.205.245.388
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Utang jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun :			
Utang bank dan lembaga keuangan bukan bank	268.446.239.497	2, 13	37.925.573.389
Utang sewa pembiayaan	62.926.736.662		19.725.278.669
Utang lain-lain Pihak berelasi	70.716.517.926	2, 15	126.546.374.413
Liabilitas pajak tangguhan	42.797.721.654	2	75.459.772.615
Liabilitas imbalan kerja	43.714.723.140	2	41.387.152.681
<i>Deferred gain on sales and leaseback</i>	2.395.234.002	2	3.208.495.503
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	490.997.172.881		304.252.647.270
JUMLAH LIABILITAS	2.522.412.549.315		2.138.457.892.658

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian ini secara keseluruhan.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA

Laporan keuangan konsolidasian interim yang tidak diaudit
Tanggal 30 September 2019
dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal
tersebut
(Mata Uang Rupiah Indonesia)

	30 September 2019	Catatan/ Notes	31 Desember 2018
	<u>Tidak diaudit</u>		<u>Tidak diaudit</u>
EKUITAS			
Ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk			
Modal saham - nilai nominal Rp 100 per saham pada periode			
30 September 2019 dan Tahun 2018	630.625.000.000	18	630.625.000.000
Tambahan modal disetor	226.788.468.642	2	226.788.468.642
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	141.425.224.187	2	141.425.224.187
Selisih transaksi nilai ekuitas dengan pihak non-pengendali	5.268.543.595	2	5.268.543.595
Penghasilan komprehensif lain	888.359.108.495	2	888.359.108.495
Saldo laba	729.265.628.796		547.312.895.310
Sub-jumlah	<u>2.621.731.973.715</u>		<u>2.439.779.240.229</u>
Kepentingan non-pengendali	10.508.708.866	2, 19	10.260.274.523
JUMLAH EKUITAS	<u>2.632.240.682.581</u>		<u>2.450.039.514.752</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	<u>5.154.653.231.896</u>		<u>4.588.497.407.410</u>

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian ini secara keseluruhan.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT
30 September 2019
(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan Lain)

	30 September 2019	Catatan/ Notes	30 September 2018
PENJUALAN BERSIH	1.408.740.451.968	2, 20	1.378.908.285.949
BEBAN POKOK PENJUALAN	(904.298.933.313)	2, 21	(903.047.036.468)
LABA BRUTO	504.441.518.655		475.861.249.481
Beban Penjualan	(76.903.085.073)	2, 22	(58.949.180.278)
Beban umum dan administrasi	(79.924.254.338)	2, 22	(100.110.804.062)
Jumlah Beban Operasional	(156.827.339.411)		(159.059.984.340)
Pendapatan Operasional	347.614.179.244		316.801.265.141
Pendapatan (Beban) Lain - Lain			
Beban bunga	(107.112.653.711)	2	(104.392.002.800)
Beban administrasi bank	(2.262.486.217)	2	(3.461.879.525)
Penghasilan bunga	-		116.847.993
Lain - lain bersih	2.655.490.027	2	13.502.564.966
Laba (rugi) pelepasan aset tetap	569.819.286	2	4.425.736.323
Laba (rugi) selisih kurs - bersih	(1.805.503.162)	2	6.389.980.301
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain - Lain	(107.955.333.777)		(83.418.752.742)
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK	239.658.845.467		233.382.512.399
MANFAAT (BEBAN) PAJAK			
Kini	(57.482.144.130)	2	(52.103.602.829)
Tangguhan	-		-
Jumlah beban pajak - bersih	(57.482.144.130)		(52.103.602.829)
LABA TAHUN BERJALAN	182.176.701.337		181.278.909.570

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian ini secara keseluruhan.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT
 Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2019
 (Disajikan dalam Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan/ Notes	Modal saham	Tambahan Modal Disetor	STPEA	Cadangan Pengukuran Imbalan Kerja	Surplus Revaluasi Aset Tetap	Selisih Translasi	RE	Jumlah	NCI	Jumlah Ekuitas
Saldo Awal - 1 Januari 2019	18	630.625.000.000	226.788.468.642	5.268.543.595	7.072.370.546	888.359.108.495	141.425.224.187	540.240.524.764	2.439.779.240.229	10.260.274.523	2.450.039.514.752
Laba tahun berjalan		-	-	-				181.928.266.994	181.928.266.994	248.434.343	182.176.701.337
Tambahan modal disetor		-	-	-					-		-
Komponen Ekuitas Lainnya		-	-	-				24.466.492	24.466.492	-	24.466.492
Saldo 30 September 2019		630.625.000.000	226.788.468.642	5.268.543.595	7.072.370.546	888.359.108.495	141.425.224.187	722.193.258.250	2.621.731.973.715	10.508.708.866	2.632.240.682.581

		Modal saham	Tambahan Modal Disetor	STPEA	Cadangan Pengukuran Imbalan Kerja	Surplus Revaluasi Aset Tetap	Selisih Translasi	RE	Jumlah	NCI	Jumlah Ekuitas
Saldo Awal - 1 Januari 2018		625.000.000.000	213.063.468.642	2.835.985.951	1.406.832.078	621.222.124.233	141.425.224.187	285.210.746.441	1.890.164.381.532	22.459.724.148	1.912.624.105.680
Laba tahun berjalan								180.387.849.864	180.387.849.864	891.059.706	181.278.909.570
Tambahan modal disetor			19.350.000.000						19.350.000.000		19.350.000.000
Komponen Ekuitas Lainnya							3.256.363.316	2.122.505.343	5.378.868.659	(13.527.712.745)	(8.148.844.086)
Saldo 30 September 2018		625.000.000.000	232.413.468.642	2.835.985.951	1.406.832.078	621.222.124.233	144.681.587.503	467.721.101.648	2.095.281.100.055	9.823.071.109	2.105.104.171.164

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian ini secara keseluruhan.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT
 Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2019
 (Disajikan dalam Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan lain)

	30 September 2019	Catatan/ Notes	30 September 2018
ARUS KAS DARI AKTIVITAS			
OPERASI			
Penerimaan kas dari pelanggan	1.373.426.380.637		1.210.281.519.127
Pembayaran kas kepada pemasok, direksi, karyawan dan beban operasional lain-lain	(1.300.497.766.013)		(1.129.567.898.642)
Kas yang diperoleh dari (digunakan untuk) operasi	72.928.614.624		80.713.620.485
Penghasilan keuangan	-		116.847.993
Beban keuangan	(109.375.139.927)		(107.853.882.325)
Pembayaran pajak	(74.731.094.316)		(52.103.602.829)
Penerimaan pajak	-		2.012.440.709
Lain-lain - bersih	2.655.490.026		13.502.564.966
Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(108.522.129.593)		(63.612.011.001)
ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS			
INVESTASI			
Perolehan aset tetap	(201.814.371.845)	11	(100.893.839.134)
Perolehan aset lain-lain	(2.668.438.817)		-
Pembayaran Uang Muka Pembelian Asset Tetap	(41.864.273.262)		-
Hasil Penjualan aset tetap	818.015.809		-
Penambahan investasi	(1.174.000.000)		-
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(246.703.068.115)		(100.893.839.134)

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian ini secara keseluruhan.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT
 Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2019 (Lanjutan)
 (Disajikan dalam Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan lain)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS

PENDANAAN

Penambahan utang bank dan lembaga keuangan bukan bank jangka panjang	241.097.383.350	116.166.363.016
Pembayaran utang bank jangka panjang	(67.522.777.917)	-
Kenaikan (Penurunan) utang bank dan lembaga keuangan bukan bank jangka pendek	143.238.547.765	-
Penambahan utang sewa pembiayaan	49.007.222.774	13.873.660.039
Pembayaran utang sewa pembiayaan	(4.206.849.667)	-
Perolehan (pembayaran) utang lain-lain	(55.829.856.487)	-
	<u>305.783.669.818</u>	<u>130.040.023.055</u>
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan		

**KENAIKAN (PENURUNAN)
BERSIH KAS, SETARA**

KAS DAN CERUKAN	(49.441.527.890)	(34.465.827.080)
------------------------	-------------------------	-------------------------

KAS, SETARA KAS DAN

CERUKAN AWAL TAHUN	64.166.199.514	(9.808.479.128)
---------------------------	-----------------------	------------------------

KAS, SETARA KAS DAN

CERUKAN AKHIR TAHUN	14.724.671.624	(44.274.306.208)
----------------------------	-----------------------	-------------------------

Kas, setara kas dan cerukan terdiri dari:

Kas dan setara kas	50.034.331.087	42.508.290.164
Cerukan	(35.309.659.463)	(86.782.596.372)
JUMLAH	14.724.671.624	(44.274.306.208)

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian ini secara keseluruhan.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT

Tanggal 30 September 2019

Dan Periode Sembilan Bulan yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan Lain)

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT Integra Indocabinet, Tbk ("Perusahaan" atau "ITG") didirikan berdasarkan akta notaris Soetjipto, S.H., No. 147 tanggal 19 Mei 1989. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-320.HT.01.01.th'90 tanggal 20 Januari 1990. Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan akta notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 17 tanggal 7 Maret 2017 antara lain mengenai perubahan status Perusahaan menjadi perseroan terbuka. Perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0005787.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 8 Maret 2017.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah berusaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, pertambangan, perindustrian, pertanian, pengangkutan, percetakan dan jasa.

Perusahaan berkedudukan di Sidoarjo dan saat ini bergerak dalam bidang produksi mebel berbahan dasar kayu dan produk kayu lainnya. Perusahaan mulai melakukan kegiatan operasinya pada tahun 1989.

PT Integra Indo Lestari (IIL) adalah entitas induk dan entitas induk terakhir Perusahaan.

b. Penawaran Umum Efek Perusahaan

Berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-307/D.04/2017, tanggal 14 Juni 2017, Pernyataan Pendaftaran Perusahaan dalam rangka Penawaran Umum Perdana telah dinyatakan efektif. Pada tanggal 21 Juni 2017, Perusahaan mencatatkan 1.250.000.000 lembar sahamnya dari modal ditempatkan dan disetor penuh dengan nilai nominal Rp 100 per saham di Bursa Efek Indonesia.

c. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

Susunan dewan komisaris dan direksi Perusahaan pada tanggal **30 September 2019** adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Hendro Rusli
Komisaris	:	Stephanie Kane Ilham
Komisaris Independen	:	Bing Hartono Poernomosidi
	:	Heri Sunaryadi

Direksi

Direktur Utama	:	Halim Rusli
Direktur	:	Widjaja Karli
	:	Syany Tjandra
Direktur Independen	:	Wang Sutrisno
Wakil Direktur Utama	:	Meity Linlin

Perusahaan dan Entitas Anaknya (bersama-sama disebut "Kelompok Usaha") memiliki 2.724 orang karyawan tetap pada tanggal **30 September 2019** (tidak diaudit).

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 September 2019
Dan Periode Sembilan Bulan yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan Lain)

1. UMUM (LANJUTAN)

d. Entitas Anak

Pada tanggal 30 September 2019, Perusahaan memiliki Entitas Anak sebagai berikut:

Entitas Anak	Domisili	Aktivitas Bisnis	Tahun Pendirian	Persentase Kepemilikan	Jumlah aset sebelum eliminasi (dalam jutaan rupiah)		
				30 September 2019			
				30 Sep, 2019	31 Des, 2018	30 Sep, 2019	31 Des, 2018
Kepemilikan Langsung/ <i>Direct Ownership</i>							
PT Narkata Rimba (NKT)	Kalimantan Timur / <i>East Kalimantan</i>	a	1978	99.00%	99.00%	153.765	155,013
PT Belayan River Timber (BRT)	Kalimantan Timur / <i>East Kalimantan</i>	a	1978	99.00%	99.00%	412.184	440,000
PT Intertrend Utama (ITR)	Sidoarjo	b	1993	99.68%	99.68%	1.133.261	1,025,240
PT Interkraft (ITK)	Sidoarjo	b	2002	99.45%	99.45%	833.911	804,346
PT Intera Indonesia (INT)	Sidoarjo	b	2012	99.71%	99.71%	631.963	391,690
PT Integriya Dekorindo (ITD)	Sidoarjo	c	2013	99.80%	99.80%	194.498	192,591
PT Inter Kayu Mandiri (IKM)	Sidoarjo	d	2015	80.00%	80.00%	16.599	16.599

Aktivitas Bisnis Entitas Anak / *Subsidiaries's Business Activity*
a. Industri Hak Pengelolaan Hutan/ *Forest Concession Right Industry*
b. Industri Mebel/ *Furniture Industry*
c. Perdagangan dan Jasa/ *Services and Trading*
d. Perusahaan Induk/ *Holding Company*

PT Narkata Rimba

Berdasarkan akta notaris Dyah Ayu Ambarwati, S.H., M.Kn., No. 8 tanggal 30 Juni 2016, para pemegang saham NKT menyetujui untuk pembagian dividen saham sebesar Rp 14,5 miliar.

Berdasarkan akta notaris Dyah Ayu Ambarwati, S.H., M.Kn., No. 5 tanggal 21 Juli 2016, para pemegang saham NKT menyetujui untuk meningkatkan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor dari Rp 30 miliar menjadi Rp 44,5 miliar. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-001378.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 1 Agustus 2016.

Berdasarkan akta notaris Dyah Ayu Ambarwati, S.H., M.Kn., No. 17 tanggal 5 September 2016, para pemegang saham NKT menyetujui pengalihan saham NKT sebesar 8.979 lembar saham dari PT Alam Mentari Sejahtera ke Perusahaan.

PT Belayan River Timber

Berdasarkan akta notaris Dyah Ayu Ambarwati, S.H., M.Kn., No. 6 tanggal 30 Juni 2016, para pemegang saham BRT menyetujui untuk pembagian dividen saham sebesar Rp 11,5 miliar.

Berdasarkan akta notaris Dyah Ayu Ambarwati, S.H., M.Kn., No. 4 tanggal 21 Juli 2016, para pemegang saham BRT menyetujui untuk meningkatkan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor dari Rp 56,407 miliar menjadi Rp 67,907 miliar. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0013769.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 1 Agustus 2016.

Berdasarkan akta notaris Dyah Ayu Ambarwati, S.H., M.Kn., No. 16 tanggal 5 September 2016, para pemegang saham BRT menyetujui pengalihan saham BRT sebesar 129.024 lembar saham dari IIL ke Perusahaan.

PT Intertrend Utama

Berdasarkan akta notaris Dyah Ayu Ambarwati, S.H., M.Kn., No. 2 tanggal 30 Juni 2016, para pemegang saham ITR menyetujui untuk pembagian dividen saham sebesar Rp 36 miliar.

Berdasarkan akta notaris Dyah Ayu Ambarwati, S.H., M.Kn., No. 8 tanggal 2 September 2016, para pemegang saham ITR menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp 91 miliar menjadi Rp 155,006 miliar.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT

Tanggal 30 September 2019

Dan Periode Sembilan Bulan yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan Lain)

1. UMUM (LANJUTAN)

d. Entitas Anak (Lanjutan)

PT Intertrend Utama

Berdasarkan akta notaris Dyah Ayu Ambarwati, S.H., M.Kn., No. 7 tanggal 21 Juni 2017, para pemegang saham ITR menyetujui untuk meningkatkan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp 155,006 miliar menjadi Rp 280,006 miliar. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0014246.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 12 Juli 2017.

PT Interkraft

Berdasarkan akta notaris Dyah Ayu Ambarwati, S.H., M.Kn., No. 4 tanggal 30 Juni 2016, para pemegang saham ITK menyetujui untuk pembagian dividen saham sebesar Rp 53 miliar.

Berdasarkan akta notaris Dyah Ayu Ambarwati, S.H., M.Kn., No. 8 tanggal 21 Juni 2017, para pemegang saham ITK menyetujui untuk meningkatkan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp 118 miliar menjadi Rp 213 miliar. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0014241.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 12 Juli 2017.

PT Intera Indonesia

Berdasarkan akta notaris Dyah Ayu Ambarwati, S.H., M.Kn., No. 9 tanggal 31 Oktober 2018, para pemegang saham menyetujui peningkatan modal dasar, ditempatkan dan disetor penuh dari Rp 22,6 miliar menjadi Rp 78 miliar.

PT Integriya Dekorindo

Berdasarkan akta notaris Siti Nurul Yuliami, S.H., M.Kn., No. 6 tanggal 21 Juni 2017, para pemegang saham ITD menyetujui untuk meningkatkan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh yang semula berjumlah Rp 20,2 miliar menjadi Rp 100,2 miliar.

PT Inter Kayu Mandiri

IKM didirikan berdasarkan akta notaris Dyah Ayu Ambarwati, S.H., M.Kn., No. 5 tanggal 19 Agustus 2015 dengan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp 16,56 miliar.

e. Tanggal Penyelesaian Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian telah diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 26 Oktober 2019.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian dan Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan "PSAK" No. 1 (Revisi 2013), "Penyajian Laporan Keuangan". Kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian, laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep akrual, dan dasar pengukuran dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang diukur dengan menggunakan dasar seperti yang disebutkan dalam catatan yang relevan.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT**

Tanggal 30 September 2019

Dan Periode Sembilan Bulan yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan Lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (LANJUTAN)**a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian dan Pernyataan Kepatuhan (Lanjutan)**

Laporan arus kas konsolidasian yang disusun dengan menggunakan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan pada laporan keuangan konsolidasian adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional dan penyajian Kelompok Usaha.

b. Standar dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan Baru Beserta Revisi

Standar akuntansi dan interpretasi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), untuk laporan keuangan konsolidasian tahun berjalan diungkapkan di bawah ini. Kelompok Usaha bermaksud untuk menerapkan standar tersebut, jika dipandang relevan, saat telah menjadi efektif.

Berlaku Efektif 1 Januari 2017:

- Amandemen PSAK No. 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan, berlaku efektif 1 Januari 2017. Amandemen ini mengklarifikasi, bukan mengubah secara signifikan, persyaratan PSAK No. 1, antara lain, mengklarifikasi mengenai materialitas, fleksibilitas urutan sistematis penyajian catatan atas laporan keuangan dan pengidentifikasian kebijakan akuntansi signifikan.
- PSAK No. 24 (Penyesuaian 2016): Imbalan Kerja, berlaku efektif 1 Januari 2017 dengan penerapan ini diperkenankan. Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa pasar obligasi korporasi berkualitas tinggi dinilai berdasarkan denominasi mata uang obligasi tersebut dan bukan berdasarkan negara dimana obligasi tersebut berada.
- PSAK No. 60 (Penyesuaian 2016): Instrumen Keuangan: Pengungkapan, berlaku efektif 1 Januari 2017 dengan penerapan ini diperkenankan. Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa entitas harus menilai sifat dari imbalan kontrak jasa untuk menentukan apakah entitas memiliki keterlibatan berkelanjutan dalam aset keuangan dan apakah persyaratan pengungkapan terkait keterlibatan berkelanjutan terpenuhi.
- ISAK No. 31: Interpretasi atas ruang lingkup PSAK No. 13: Properti Investasi. ISAK ini memberikan interpretasi atas karakteristik bangunan yang digunakan sebagai bagian dari definisi properti investasi dalam PSAK No. 13.

Kelompok Usaha telah mengevaluasi dampak dari standar akuntansi tersebut di atas dan menentukan dampaknya tidak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Berlaku Efektif 1 Januari 2018:

- Amandemen PSAK No. 2: Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan, berlaku efektif 1 Januari 2018 dengan penerapan ini diperkenankan. Amandemen ini mensyaratkan entitas untuk menyediakan pengungkapan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas maupun perubahan non-kas.
- Amandemen PSAK No. 46: Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi, berlaku efektif 1 Januari 2018 dengan penerapan ini diperkenankan. Amandemen ini mengklarifikasi bahwa untuk menentukan apakah laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dapat dimanfaatkan, estimasi atas kemungkinan besar laba kena pajak masa depan dapat mencakup pemulihan beberapa aset entitas melebihi jumlah tercatatnya.

Kelompok Usaha sedang mengevaluasi dampak dari standar akuntansi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan konsolidasian.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT

Tanggal 30 September 2019

Dan Periode Sembilan Bulan yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan Lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (LANJUTAN)

c. Prinsip-prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari laporan keuangan Perusahaan dan Entitas Anaknyanya. Pengendalian didapat ketika Kelompok Usaha terekspos, atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee* dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas *investee*.

Secara khusus, Kelompok Usaha mengendalikan *investee* jika, dan hanya jika, Kelompok Usaha memiliki seluruh hal berikut ini:

- kekuasaan atas *investee*, yaitu hak yang ada saat ini yang memberi investor kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari *investee*;
- eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*; dan
- kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* mempengaruhi jumlah imbal investor.

Ketika Kelompok Usaha memiliki kurang dari hak suara mayoritas, Kelompok Usaha dapat mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah memiliki kekuasaan atas *investee*, termasuk:

- pengaturan kontraktual dengan pemegang hak suara yang lain;
- hak yang timbul atas pengaturan kontraktual lain; dan
- hak suara dan hak potensial Kelompok Usaha.

Kelompok Usaha menilai kembali apakah investor mengendalikan *investee* jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian.

Konsolidasi atas Entitas Anaknyanya dimulai ketika Kelompok Usaha memiliki pengendalian atas Entitas Anaknyanya dan berhenti ketika Kelompok Usaha kehilangan pengendalian atas Entitas Anaknyanya. Aset, liabilitas, pendapatan, dan beban atas Entitas Anaknyanya yang diakuisisi atau dilepas selama periode termasuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dari tanggal Kelompok Usaha memperoleh pengendalian sampai dengan tanggal Kelompok Usaha menghentikan pengendalian atas Entitas Anaknyanya.

Laba atau rugi dan setiap komponen atas penghasilan komprehensif lain diatribusikan pada pemegang saham entitas induk Kelompok Usaha dan pada kepentingan non-pengendali ("KNP"), walaupun hasil di KNP mempunyai saldo defisit. Bila diperlukan, penyesuaian dilakukan pada laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansinya sesuai dengan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha. Semua aset dan liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban dan arus kas berkaitan dengan transaksi antar anggota Kelompok Usaha akan dieliminasi secara penuh dalam proses konsolidasi.

Seluruh akun dan transaksi antar perusahaan yang material, termasuk keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi, jika ada, dieliminasi untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil operasi Kelompok Usaha sebagai satu kesatuan usaha.

Laporan keuangan Entitas Anaknyanya disusun atas periode pelaporan yang sama dengan Perusahaan.

Perubahan kepemilikan di Entitas Anaknyanya, tanpa kehilangan pengendalian, dihitung sebagai transaksi ekuitas. Jika Kelompok Usaha kehilangan pengendalian atas Entitas Anaknyanya, maka:

- menghentikan pengakuan aset (termasuk *goodwill*) dan liabilitas Entitas Anaknyanya;
- menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap KNP;
- menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran yang dicatat di ekuitas, bila ada;
- mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima;
- mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya;
- mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi;
- mereklasifikasi ke laba rugi proporsi keuntungan dan kerugian yang telah diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain atau saldo laba, begitu pula menjadi persyaratan jika Kelompok Usaha akan melepas secara langsung aset atau liabilitas yang terkait.

Rugi Entitas Anaknyanya yang tidak dimiliki secara penuh diatribusikan pada KNP bahkan jika hal ini mengakibatkan KNP mempunyai saldo defisit.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT**

Tanggal 30 September 2019

Dan Periode Sembilan Bulan yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan Lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)**c. Prinsip-prinsip Konsolidasian (Lanjutan)**

KNP mencerminkan bagian atas laba atau rugi dan aset neto dari Entitas Anaknya yang tidak dapat diatribusikan secara langsung maupun tidak langsung kepada Perusahaan, yang masing-masing disajikan dalam laba atau rugi dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada Entitas Anaknya yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas (dalam hal ini transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik).

d. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

Kombinasi bisnis entitas sepengendali dicatat dengan menggunakan metode penyatuan kepentingan, dimana selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dengan jumlah tercatat atas neto entitas yang diakuisisi diakui sebagai bagian dari akun "Tambah modal disetor" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Dalam menerapkan metode penyatuan kepentingan tersebut, unsur-unsur laporan keuangan dari entitas yang bergabung disajikan seolah-olah penggabungan tersebut telah terjadi sejak awal periode entitas yang bergabung berada dalam sepengendalian.

e. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Mata uang pelaporan yang digunakan pada laporan keuangan konsolidasian adalah Rupiah, yang juga merupakan mata uang fungsional Kelompok Usaha.

Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan sesuai dengan rata-rata kurs jual dan beli yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal transaksi perbankan terakhir untuk periode yang bersangkutan, dan laba atau rugi selisih kurs yang timbul, dikreditkan atau dibebankan pada operasi periode yang bersangkutan.

Pada tanggal 30 September 2019, nilai tukar yang digunakan adalah sebagai berikut

Mata Uang	Sept 2019	2018
US\$ 1	14,174	14,481
Euro 1	15,500	16,560
Sin\$ 1	10,258	10,603
RMB 1	2,004	2,110

f. Instrumen Keuangan

Kelompok Usaha menerapkan PSAK No. 50 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Penyajian", PSAK No. 55 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" dan PSAK No. 60 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengungkapan".

i. Aset KeuanganPengakuan awal

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, aset keuangan tersedia untuk dijual, atau sebagai derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif. Pengklasifikasian ini tergantung pada hakekat dan tujuan aset keuangan diperoleh dan ditetapkan pada saat pengakuan awal. Tidak terdapat klasifikasi aset keuangan Kelompok Usaha sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang dimiliki hingga jatuh tempo (HTM) dan aset keuangan tersedia untuk dijual.

Aset keuangan pada awalnya diakui pada nilai wajar, dan dalam hal aset keuangan yang tidak diakui pada nilai wajar melalui laba rugi, ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT

Tanggal 30 September 2019

Dan Periode Sembilan Bulan yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan Lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

i. Aset Keuangan (Lanjutan)

Pengakuan awal (Lanjutan)

Aset keuangan Kelompok Usaha yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang mencakup kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lain-lain.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Setelah pengakuan awal, aset keuangan tersebut dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dan keuntungan dan kerugian terkait diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada saat pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, demikian juga melalui proses amortisasi.

Penghentian pengakuan aset keuangan

Penghentian pengakuan atas suatu aset keuangan, atau, bila dapat diterapkan untuk bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa, terjadi bila:

- i Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
- ii Kelompok Usaha mentransfer hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tersebut tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan, dan (a) Kelompok Usaha secara substansial memindahkan seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan tersebut, atau (b) Kelompok Usaha secara substansial tidak memindahkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun telah memindahkan pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Apabila Kelompok Usaha mengalihkan hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau mengadakan kesepakatan penyerahan dan tidak mentransfer maupun memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan tersebut dan juga tidak mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut, maka suatu aset keuangan baru diakui oleh Kelompok Usaha sebesar keterlibatannya yang berkelanjutan atas aset keuangan tersebut.

Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur sebesar jumlah terendah antara nilai tercatat aset yang ditransfer dan nilai maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali oleh Kelompok Usaha.

Pada saat penghentian pengakuan atas aset keuangan secara keseluruhan, maka selisih antara nilai tercatat dan jumlah dari (i) pembayaran yang diterima, termasuk aset baru yang diperoleh dikurangi dengan liabilitas baru yang ditanggung, dan (ii) keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas, harus diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Pada saat penghentian pengakuan aset keuangan sebagian (sebagai contoh ketika Kelompok Usaha memegang opsi untuk membeli kembali bagian dari aset yang ditransfer) Kelompok Usaha mengalokasikan nilai tercatat sebelumnya dari aset keuangan antara bagian berkelanjutan yang diakui dalam keterlibatan berkelanjutan, dan bagian yang tidak lagi diakui dengan menggunakan nilai wajar relatif dari bagian tersebut pada tanggal pengalihan. Selisih antara nilai tercatat yang dialokasikan dengan bagian yang tidak lagi diakui dan jumlah dari penerimaan dari bagian yang tidak lagi diakui dan setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang dialokasikan dan telah diakui pada penghasilan komprehensif lain diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Akumulasi keuntungan atau kerugian yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dialokasikan antara bagian yang berkelanjutan diakui dan bagian yang tidak lagi diakui dengan dasar nilai wajar relatif pada bagian-bagian tersebut.

Penurunan nilai dari aset keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Kelompok Usaha mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan dianggap telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari salah satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

i. Aset Keuangan (Lanjutan)

Penurunan nilai dari aset keuangan (Lanjutan)

awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Kelompok Usaha menentukan apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual atau kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual. Jika Kelompok Usaha menentukan tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, termasuk aset dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan kelompok secara kolektif dinilai untuk penurunan nilai. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jumlah kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang penurunan nilainya dievaluasi secara individual diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif pada awal aset keuangan tersebut.

Nilai tercatat aset tersebut dikurangi melalui akun cadangan kerugian penurunan nilai dan kerugian penurunan nilai diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan yang penurunan nilainya dievaluasi secara kolektif, diestimasi berdasarkan kerugian historis yang pernah dialami atas aset-aset yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dengan kelompok tersebut.

Kerugian historis yang pernah dialami kemudian disesuaikan berdasarkan data terkini yang dapat diobservasi untuk mencerminkan kondisi saat ini yang tidak berpengaruh pada periode terjadinya kerugian historis tersebut dan untuk menghilangkan pengaruh kondisi yang ada pada periode historis namun sudah tidak ada lagi pada saat ini.

Bukti penurunan nilai dapat meliputi indikasi pihak peminjam atau kelompok pihak peminjam mengalami kesulitan keuangan signifikan, wanprestasi atau tunggakan pembayaran bunga atau pokok, terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya dan pada saat data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang, seperti meningkatnya tunggakan atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan wanprestasi.

- Aset keuangan dicatat pada biaya perolehan diamortisasi

Jika, pada periode berikutnya, nilai estimasi kerugian penurunan nilai aset keuangan bertambah atau berkurang karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui bertambah atau berkurang dengan menyesuaikan akun penyisihan.

Pemulihan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset keuangan melebihi biaya perolehan diamortisasi yang seharusnya jika penurunan nilai tidak diakui pada tanggal pemulihan dilakukan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Jika penghapusan kemudian dipulihkan, maka pemulihan tersebut juga diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

i. Aset Keuangan (Lanjutan)

Penurunan nilai dari aset keuangan (Lanjutan)

Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi atas instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi dan tidak dicatat pada nilai wajar karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal, maka jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dan nilai kini estimasi arus kas masa mendatang yang didiskontokan pada tingkat pengembalian yang berlaku di pasar untuk aset keuangan serupa. Kerugian penurunan nilai tersebut tidak dapat dipulihkan pada periode berikutnya.

ii. Liabilitas Keuangan

Pengakuan awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Kelompok Usaha menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Saat pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar dan dalam hal liabilitas yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Liabilitas keuangan Kelompok Usaha yang dikategorikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi mencakup utang bank dan lembaga keuangan bukan bank, utang usaha, utang lain-lain, dan beban akrual.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Setelah pengakuan awal, pada liabilitas keuangan yang dikenakan bunga selanjutnya diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Pada tanggal pelaporan, biaya bunga akrual dicatat secara terpisah dari pokok pinjaman terkait dalam bagian liabilitas lancar. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian ketika liabilitas dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Ketika sebuah liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan liabilitas keuangan yang lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang secara substansial berbeda atau terdapat modifikasi secara substansial atau persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut maka pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas tersebut dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

iii. Metode suku bunga efektif (SBE)

Metode SBE adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan yang diamortisasi dari aset keuangan dan mengalokasikan penghasilan bunga selama periode yang relevan. SBE adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi arus kas di masa datang (termasuk semua biaya yang diterima yang merupakan bagian tak terpisahkan dari SBE, biaya transaksi dan seluruh premium atau diskonto lainnya) selama perkiraan umur dari aset keuangan atau jika lebih tepat digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat neto dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

iv. Biaya Perolehan Diamortisasi dari Instrumen Keuangan

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan penyisihan atas penurunan nilai dan pembayaran pokok atau pengurangan. Perhitungan tersebut mempertimbangkan premium atau diskonto pada saat perolehan dan termasuk biaya transaksi dan biaya yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

v. Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika dan hanya jika saat ini memiliki hak secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

vi. Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Kelompok Usaha menilai instrumen keuangan seperti derivatif, pada nilai wajar setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian. Nilai wajar atas instrumen keuangan diukur pada biaya diamortisasi diungkapkan di Catatan 27.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- Di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut, atau
- Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Kelompok Usaha harus memiliki akses ke pasar utama.

Nilai wajar aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar atas aset non-keuangan mempertimbangkan kemampuan pelaku pasar dalam menghasilkan keuntungan ekonomi dengan penggunaan aset pada kemampuan tertinggi dan terbaik aset atau dengan menjualnya ke pelaku pasar yang lain yang akan menggunakan aset di kemampuan tertinggi dan terbaik.

Kelompok Usaha menggunakan teknik penilaian yang tepat sesuai keadaan dan dimana tersedia kecukupan data untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalisir penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

- Level 1 - Nilai wajar diukur berdasarkan pada harga kuotasi (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas sejenis;
- Level 2 - Nilai wajar diukur berdasarkan teknik-teknik valuasi dimana seluruh input yang mempunyai efek yang signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Level 3 - Nilai wajar diukur berdasarkan teknik-teknik valuasi dimana seluruh input yang mempunyai efek yang signifikan atas nilai wajar tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT

Tanggal 30 September 2019

Dan Periode Sembilan Bulan yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan Lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

vi. Nilai Wajar Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan konsolidasian secara berulang, Kelompok Usaha menentukan apakah terjadi transfer antara level di dalam hirarki dengan cara mengevaluasi kategori (berdasarkan input level terendah yang signifikan dalam pengukuran nilai wajar) setiap akhir periode pelaporan.

Untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, Kelompok Usaha telah menentukan kelas aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik dan risiko aset atau liabilitas, dan level hirarki nilai wajar seperti dijelaskan di atas.

g. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas dan bank termasuk semua investasi yang tidak dibatasi penggunaannya yang jatuh tempo dalam waktu atau kurang sejak tanggal penempatannya dan tidak dijamin serta tidak dibatasi penggunaannya.

Dalam penyajian laporan arus kas konsolidasian, cerukan termasuk komponen kas dan setara kas karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan kas.

h. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi bersih (*the lower of cost or net realizable value*). Nilai perolehan ditentukan dengan metode rata-rata yang meliputi biaya pembelian, biaya konversi dan biaya lainnya yang timbul hingga persediaan berada dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau dipakai. Persediaan barang jadi dan barang dalam proses mencakup alokasi yang layak atas biaya produksi tidak langsung tetap dan variabel, disamping bahan baku dan upah langsung.

Nilai realisasi bersih adalah taksiran harga penjualan dalam kegiatan usaha normal setelah dikurangi taksiran biaya penyelesaian dan taksiran biaya yang diperlukan untuk melaksanakan penjualan.

Penyisihan persediaan usang ditetapkan untuk menurunkan nilai tercatat persediaan ke nilai realisasi bersihnya.

i. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus.

j. Aset Tetap

Tanah dan bangunan disajikan sebesar nilai revaluasi, dikurangi akumulasi penyusutan untuk bangunan. Revaluasi akan dilakukan dengan keteraturan yang cukup regular untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan.

Frekuensi revaluasi tergantung perubahan nilai wajar dari suatu aset tetap yang direvaluasi. Jika aset tetap mengalami perubahan nilai wajar secara signifikan dan fluktuatif, maka revaluasi secara tahunan, apabila perubahan nilai wajar tidak signifikan maka aset tersebut perlu direvaluasi setiap tiga atau lima tahun sekali.

Surplus revaluasi diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi aset tetap. Namun, kenaikan tersebut diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laba rugi. Defisit revaluasi diakui dalam laba rugi. Namun penurunan nilai tersebut diakui dalam surplus revaluasi aset tetap sepanjang tidak melebihi saldo surplus revaluasi untuk aset tersebut.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT**

Tanggal 30 September 2019

Dan Periode Sembilan Bulan yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan Lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)**j. Aset Tetap (Lanjutan)**

Surplus/defisit revaluasi aset tetap yang dipindahkan secara berkala setiap periode ke saldo laba adalah sebesar perbedaan antar jumlah penyusutan berdasarkan nilai revaluasian aset dengan jumlah penyusutan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut. Selanjutnya, akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasian dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto dari aset dan jumlah tercatat neto setelah eliminasi disajikan kembali sebesar jumlah revaluasian dari aset tersebut. Pada saat penghentian aset, surplus/defisit revaluasi untuk aset tetap yang dijual dipindahkan ke saldo laba.

Aset tetap, kecuali tanah dan bangunan, dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai, jika ada. Biaya perolehan aset tetap meliputi: (a) harga pembelian, (b) biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisinya sekarang, dan (c) estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan dan restorasi lokasi aset (jika ada). Setiap bagian dari aset tetap dengan biaya perolehan yang signifikan terhadap jumlah biaya perolehan aset, disusutkan secara terpisah.

Pada saat pembaharuan dan perbaikan yang signifikan dilakukan, biaya tersebut diakui ke dalam nilai tercatat (*carrying amount*) aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya perbaikan dan pemeliharaan lainnya yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dibebankan langsung pada operasi berjalan.

Penyusutan aset tetap, kecuali tanah, dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

	Tahun/ Years
Bangunan	10-20
Sarana prasarana	10
Instalasi listrik	8-20
Mesin dan peralatan	4-16
Alat-alat berat	8
Kendaraan	4-8
Inventaris kantor	4-8
Inventaris kamp	4-8
Inventaris pabrik	4-8
Inventaris toko	4-8

Tanah tidak diamortisasi.

Biaya pengurusan legal hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Bangunan ("HGB") yang dikeluarkan ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah pada akun "Aset Tetap" dan tidak diamortisasi. Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laba atau rugi pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Pada setiap akhir periode pelaporan, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan aset tetap telah ditelaah oleh manajemen dan jika perlu disesuaikan secara prospektif.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Akumulasi biaya perolehan aset dalam penyelesaian akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap atau properti investasi yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan sesuai dengan tujuannya.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT**

Tanggal 30 September 2019

Dan Periode Sembilan Bulan yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan Lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)**j. Aset Tetap (Lanjutan)**

Aset tetap – bangun, kelola dan alih berupa bangunan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan umur ekonomis dari aset tetap – bangun, kelola dan alih yang bersangkutan, maksimum sesuai jangka waktu perjanjian.

k. Properti Investasi

Properti investasi Entitas Anak terdiri dari tanah yang dikuasai Kelompok Usaha untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Properti investasi disajikan sebesar nilai revaluasi. Revaluasi akan dilakukan dengan keteraturan yang cukup regular untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya.

Laba atau rugi yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dalam tahun terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

Pengalihan ke properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian oleh pemilik, dimulainya sewa operasi ke pihak lain atau selesainya pembangunan atau pengembangan. Pengalihan dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik atau dimulainya pengembangan untuk dijual.

Untuk pengalihan dari properti investasi ke properti yang digunakan sendiri, Kelompok Usaha menggunakan metode biaya pada tanggal perubahan penggunaan. Jika properti yang digunakan Kelompok Usaha menjadi properti investasi, Kelompok Usaha mencatat properti investasi tersebut sesuai dengan kebijakan aset tetap sampai dengan saat tanggal terakhir perubahan penggunaannya.

l. Biaya Pengelolaan Hak Pengusahaan Hutan

Biaya/iuran yang terjadi untuk memperoleh “Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)”; seperti biaya Hak Pengusahaan Hutan (HPH), analisis mengenai dampak lingkungan, foto udara dan rencana karya pengusahaan hutan, ditangguhkan dan diamortisasi selama sisa masa manfaat masing-masing IUPHHK tersebut dengan menggunakan metode garis lurus selama jangka waktu IUPHHK.

m. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Kelompok Usaha menilai apakah terdapat indikasi suatu aset non-keuangan mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka Kelompok Usaha membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut untuk menentukan kerugian penurunan nilai (jika ada). Jika tidak mungkin mengestimasi jumlah terpulihkan dari aset non-keuangan secara individual, Kelompok Usaha akan mengestimasi jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas atas aset (“UPK”).

Estimasi jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau UPK dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya. Ketika jumlah terpulihkan suatu aset non-keuangan (UPK) di bawah nilai tercatatnya, maka nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya dan kerugian penurunan nilai yang timbul diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT**

Tanggal 30 September 2019

Dan Periode Sembilan Bulan yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan Lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)**n. Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Kelompok Usaha dan jumlahnya dapat diukur secara handal. Pendapatan diukur pada nilai wajar imbalan yang diterima, tidak termasuk diskon, rabat dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pendapatan diakui ketika risiko dan manfaat yang signifikan telah dipindahkan kepada pembeli, bersamaan dengan waktu pengiriman dan penerimaannya.

Beban diakui pada saat terjadinya berdasarkan metode akrual.

o. Sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan perjanjian sewa atau perjanjian yang mengandung sewa, didasarkan atas substansi perjanjian pada tanggal awal sewa dan apakah pemenuhan perjanjian tergantung pada penggunaan suatu aset spesifik dan perjanjian tersebut memberikan suatu hak untuk menggunakan aset tersebut. Sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset kepada *lessee*, diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan.

Selanjutnya, suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi, jika sewa tersebut tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

Kelompok Usaha sebagai *lessee*

Pada awal masa sewa, *lessee* mengakui sewa pembiayaan sebagai aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar nilai wajar aset sewa pembiayaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Pembayaran sewa minimum dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan liabilitas. Beban keuangan dialokasikan ke setiap periode selama masa sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas. Rental kontinjen dibebankan pada periode terjadinya. Beban keuangan dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Aset sewa pembiayaan yang dimiliki oleh *lessee* dengan dasar sewa pembiayaan disusutkan secara konsisten dengan metode yang sama yang digunakan untuk aset yang dimiliki sendiri, atau disusutkan secara penuh selama jangka waktu yang lebih pendek antara periode masa sewa dan umur manfaat aset sewa pembiayaan, jika tidak ada kepastian yang memadai bahwa *lessee* akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa.

Kelompok Usaha sebagai *lessor*

Kelompok Usaha mengakui aset untuk sewa operasi di laporan posisi keuangan konsolidasian sesuai sifat aset tersebut. Biaya langsung awal sehubungan proses negosiasi sewa operasi ditambahkan ke nilai tercatat dari aset sewaan dan diakui sebagai beban selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Rental kontinjen, jika ada, diakui sebagai pendapatan pada periode terjadinya. Pendapatan sewa operasi diakui sebagai pendapatan dengan metode garis lurus sesuai dengan perjanjian sewanya.

p. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Kelompok Usaha mempunyai transaksi-transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

Transaksi-transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Semua transaksi-transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak yang berelasi telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT

Tanggal 30 September 2019

Dan Periode Sembilan Bulan yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan Lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

q. Kapitalisasi Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, konstruksi atau pembuatan aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pinjaman terdiri dari biaya bunga dan biaya lain yang ditanggung entitas anak sehubungan dengan peminjaman dana.

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya dan pengeluaran untuk aset kualifikasian dan biaya pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat selesainya secara substansi seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya.

r. Perpajakan

Kelompok Usaha menerapkan PSAK No. 46 (Revisi 2014) "Pajak Penghasilan".

Pajak Kini

Aset dan liabilitas pajak penghasilan kini yang berasal dari tahun berjalan dan tahun lalu dicatat sebesar jumlah ekspektasi direstitusi dari atau dibayarkan kepada kantor pajak yang besarnya ditentukan berdasarkan tarif pajak dan peraturan perpajakan yang berlaku atau secara substantif telah berlaku.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang bersangkutan. Pengaruh pajak untuk suatu tahun dialokasikan pada usaha tahun berjalan, kecuali untuk pengaruh pajak dari transaksi yang langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang diambil Kelompok Usaha sehubungan dengan situasi dimana interpretasi diperlukan untuk peraturan perpajakan yang terkait dan menetapkan provisi jika diperlukan.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan dan banding, pada saat keputusan atas keberatan dan banding tersebut telah ditetapkan.

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diakui menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dan nilai tercatatnya dalam laporan keuangan pada akhir periode pelaporan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk setiap perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang belum dikompensasi, sejauh terdapat kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang belum dikompensasi.

Nilai tercatat dari aset pajak tangguhan di-*review* pada setiap akhir periode pelaporan dan diturunkan ketika tidak lagi terdapat kemungkinan bahwa akan terdapat laba kena pajak yang memungkinkan semua atau sebagian dari aset pajak tangguhan tersebut untuk direalisasi. Penelaahan dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan atas aset pajak tangguhan yang tidak diakui sebelumnya dan aset pajak tangguhan tersebut diakui sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak mendatang akan tersedia sehingga aset pajak tangguhan tersebut dipulihkan.

Pajak tangguhan yang terkait dengan pos-pos yang diakui di luar laba rugi diakui di luar laba rugi. Pos pajak tangguhan diakui terkait dengan transaksi yang mendasarinya baik dalam penghasilan komprehensif lain atau langsung ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika terdapat hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan pajak tangguhan tersebut terkait dengan entitas kena pajak yang sama dan otoritas perpajakan yang sama.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT

Tanggal 30 September 2019

Dan Periode Sembilan Bulan yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan Lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

s. Imbalan Kerja

Kelompok Usaha mengakui liabilitas imbalan kerja yang tidak didanai sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003 ("UUK"). Berdasarkan UUK, Kelompok Usaha diharuskan untuk membayar pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak kepada karyawan jika persyaratan yang ditentukan dalam UU tersebut terpenuhi.

Liabilitas imbalan kerja dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected-unit-credit* dan menerapkan asumsi atas tingkat diskonto.

Pengukuran kembali terdiri atas keuntungan dan kerugian aktuarial, segera diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian dengan pengaruh langsung didebit atau dikreditkan kepada saldo laba melalui penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba rugi periode berikutnya.

Biaya jasa lalu harus diakui sebagai beban pada saat yang lebih awal diantara:

- i) Ketika program amandemen atau kurtailmen terjadi; dan
- ii) ketika entitas mengakui biaya restrukturisasi atau imbalan terminasi terkait
- iii) Beban atau penghasilan bunga neto.

Bunga neto dihitung dengan menerapkan tingkat diskonto yang digunakan terhadap liabilitas imbalan kerja. Kelompok Usaha mengakui perubahan berikut pada kewajiban obligasi neto pada akun "Beban Umum dan Administrasi" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian:

- i) Biaya jasa terdiri atas biaya jasa kini, biaya jasa lalu, keuntungan atau kerugian atas penyelesaian (kurtailmen) tidak rutin, dan;
- ii) Beban atau penghasilan bunga neto.

t. Provisi

Provisi diakui jika Kelompok Usaha memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) jika, sebagai akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinan penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan jumlah kewajiban tersebut dapat diestimasi secara handal.

Seluruh provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika kemungkinan besar tidak terjadi arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, maka provisi dibatalkan.

u. Laba per Saham

Laba per saham dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar selama tahun yang bersangkutan.

Pada tanggal **30 September 2019**, tidak ada efek yang berpotensi menjadi saham biasa. Oleh karena itu, laba per saham dilusian sama dengan laba per saham dasar.

v. Segmen Operasi

Segmen adalah bagian khusus dari Kelompok Usaha yang terlibat baik dalam menyediakan jasa (segmen usaha), maupun dalam menyediakan jasa dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dari segmen lainnya.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT

Tanggal 30 September 2019

Dan Periode Sembilan Bulan yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan Lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

v. Segmen Operasi (Lanjutan)

Pendapatan, beban, hasil usaha, aset dan liabilitas segmen termasuk item-item yang dapat diatribusikan secara langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dialokasikan dengan dasar yang memadai untuk segmen tersebut.

w. Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak

Sesuai dengan PSAK No. 70, aset pengampunan pajak diukur pada saat pengakuan awal sebesar biaya perolehan aset pengampunan pajak berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Biaya perolehan aset pengampunan pajak merupakan *deemed cost* dan menjadi dasar bagi Kelompok Usaha dalam melakukan pengukuran setelah pengakuan awal mengacu pada standar akuntansi keuangan yang relevan.

Liabilitas pengampunan pajak diukur sebesar kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau setara kas untuk menyelesaikan kewajiban yang berkaitan langsung dengan perolehan aset pengampunan pajak.

Kelompok Usaha mengakui selisih antara aset pengampunan pajak dan liabilitas pengampunan pajak di ekuitas dalam akun Tambahan Modal Disetor. Kelompok Usaha mengakui uang tebusan yang dibayarkan dalam laba rugi pada periode SKPP disampaikan.

x. Peristiwa setelah Periode Laporan Keuangan Konsolidasian

Peristiwa setelah akhir tahun laporan yang memberikan informasi tambahan terkait posisi Kelompok Usaha pada periode laporan keuangan konsolidasian ("*adjusting events*") disajikan dalam laporan keuangan. Peristiwa setelah akhir tahun laporan yang bukan *adjusting events* telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian apabila material.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mewajibkan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Sehubungan dengan adanya ketidakpastian yang melekat dalam membuat estimasi, hasil sebenarnya yang dilaporkan di masa mendatang dapat berbeda dengan jumlah estimasi yang dibuat.

a. Pertimbangan

i. Penentuan Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional dari masing-masing entitas dalam Kelompok Usaha adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer dimana entitas beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi pendapatan dan beban dari Kelompok Usaha.

ii. Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Kelompok Usaha menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan berdasarkan definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 (Revisi 2014). Dengan demikian, aset dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha.

iii. Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Usaha

Kelompok Usaha mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa pelanggan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajibannya. Dalam hal tersebut, Kelompok Usaha mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit dari pihak ketiga dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat provisi spesifik atas jumlah piutang pelanggan guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Kelompok Usaha.

Provisi spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah penyisihan untuk penurunan nilai piutang.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT

Tanggal 30 September 2019

Dan Periode Sembilan Bulan yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan Lain)

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN (Lanjutan)

a. Pertimbangan (Lanjutan)

iv. Tagihan dan Keberatan atas Hasil Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, manajemen mempertimbangkan apakah jumlah tercatat dalam akun di atas dapat dipulihkan dan direstitusi oleh Kantor Pajak. Lebih lanjut, manajemen mempertimbangkan liabilitas yang mungkin timbul dari hasil pemeriksaan pajak yang masih diajukan keberatannya.

v. Revaluasi Tanah dan Bangunan

Kelompok Usaha mengukur tanah dan bangunan pada jumlah revaluasi dengan perubahan pada nilai wajar diakui dalam Penghasilan Komprehensif Lain (OCI). Kelompok Usaha melibatkan penilai independen dalam menentukan nilai wajar tanah dan bangunan pada tanggal 31 Desember 2016. Nilai wajar tanah dan bangunan ditentukan berdasarkan bukti pasar dengan menggunakan harga yang dapat dibandingkan dan disesuaikan terhadap faktor-faktor pasar spesifik seperti sifat, lokasi dan kondisi aset tersebut.

b. Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Kelompok Usaha mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun.

Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Kelompok Usaha. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

i. Estimasi Imbalan Kerja

Penentuan liabilitas imbalan kerja Kelompok Usaha bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Kelompok Usaha langsung diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada saat terjadinya.

Sementara Kelompok Usaha berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Kelompok Usaha dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas imbalan kerja dan beban imbalan kerja bersih.

ii. Penyusutan Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 sampai dengan 20 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Kelompok Usaha menjalankan bisnisnya.

Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

Ketika nilai wajar dari aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat atau disajikan di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian tidak dapat diambil dari pasar yang aktif, maka nilai wajarnya ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian termasuk model *discounted cash flow*. Masukan untuk model tersebut

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT

Tanggal 30 September 2019

Dan Periode Sembilan Bulan yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan Lain)

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN (Lanjutan)

b. Estimasi dan Asumsi (Lanjutan)

iii. Pertimbangan Nilai Wajar dari Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

dapat diambil dari pasar yang dapat diobservasi, tetapi apabila hal ini tidak dimungkinkan, sebuah tingkat pertimbangan disyaratkan dalam menetapkan nilai wajar.

Pertimbangan tersebut mencakup penggunaan masukan seperti risiko likuiditas, risiko kredit dan risiko pasar. Perubahan dalam asumsi mengenai faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi nilai wajar dari instrumen keuangan yang dilaporkan.

iv. Penyisihan Penurunan Nilai Pasar dan Keusangan Persediaan

Penyisihan penurunan nilai pasar dan keusangan persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada, kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan. Provisi dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi.

v. Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Kelompok Usaha mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

vi. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Penurunan nilai muncul saat nilai tercatat aset atau UPK melebihi nilai terpulihkannya, yang lebih besar antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual didasarkan pada ketersediaan data dari perjanjian penjualan yang mengikat yang dibuat dalam transaksi normal atas aset serupa atau harga pasar yang dapat diamati dikurangi dengan biaya tambahan yang dapat diatribusikan dengan pelepasan aset.

Perhitungan nilai pakai didasarkan pada model arus kas yang didiskontokan. Arus kas diproyeksikan ke depan dan tidak termasuk aktivitas restrukturisasi yang belum ada perikatannya atau investasi signifikan di masa depan yang akan meningkatkan kinerja dari UPK yang diuji. Nilai terpulihkan paling sensitif terhadap tingkat diskonto yang digunakan untuk model arus kas yang didiskontokan seperti halnya dengan arus kas masuk masa depan yang diharapkan dan tingkat pertumbuhan yang digunakan untuk tujuan ekstrapolasi.

vii. Ketidakpastian Liabilitas Perpajakan

Dalam situasi tertentu, Kelompok Usaha tidak dapat menentukan secara pasti jumlah liabilitas pajak mereka pada saat ini atau masa depan karena proses pemeriksaan oleh otoritas perpajakan. Ketidakpastian timbul terkait dengan interpretasi dari peraturan perpajakan yang kompleks dan jumlah dan waktu dari penghasilan kena pajak di masa depan.

Dalam menentukan jumlah yang harus diakui terkait dengan liabilitas pajak yang tidak pasti, Kelompok Usaha menerapkan pertimbangan yang sama yang akan mereka gunakan dalam menentukan jumlah cadangan yang harus diakui sesuai dengan PSAK No. 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi". Kelompok Usaha membuat analisa untuk semua posisi pajak terkait dengan pajak penghasilan untuk menentukan jika liabilitas pajak untuk manfaat pajak yang belum diakui harus diakui.

4. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Mulai 1 Januari 2016, mata uang fungsional Kelompok Usaha menurut biaya dan pendanaan menggunakan mata uang Rupiah. Dengan demikian, laporan keuangan pencatatan Kelompok Usaha berubah dari USD ke IDR.

Sesuai dengan ketentuan PSAK 10, ketika ada perubahan dalam mata uang fungsional entitas, entitas harus menerapkan prosedur translasi berlaku untuk mata uang fungsional baru secara prospektif sejak tanggal perubahan yang efektif 1 Januari 2016.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT**

Tanggal 30 September 2019

Dan Periode Sembilan Bulan yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan Lain)

5. KAS DAN SETARA KAS

Akun ini terdiri dari:

	30 September 2019 (Tidak diaudit)	31 Desember 2018 (Diaudit)
KAS	7.853.600.096	1.333.607.072
BANK		
<u>Rupiah</u>		
PT Bank Negara Indonesia Tbk	6.520.193.049	2.430.791.756
PT Bank Central Asia Tbk	12.977.613.420	4.873.394.724
PT UOB Buana Indonesia	-	-
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	233.670.491	343.393.322
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	305.396.904	310.170.198
PT Bank ICBC	21.899.244	23.146.452
PT Bank Mega Tbk	1.839.118	1.135.886
PT Bank KEB Hana Indonesia	1.062.746	-
PT Bank Jatim, Tbk	5.879.884	-
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk	15.424.795	-
<u>Dollar Amerika Serikat</u>		
PT Bank Negara Indonesia Tbk	1.628.405.079	31.598.569.051
PT Bank Central Asia Tbk	12.758.190.183	2.169.027.896
PT UOB Buana Indonesia	4.933.969	5.503.216
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	940.382.109	3.038.933.569
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	13.152.369
PT Bank ICBC	232.575.638	308.994.709
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk	118.624.474	
<u>Ren Min Bi</u>		
PT Bank ICBC	14.639.888	15.879.294
SETARA KAS - DEPOSITO BERJANGKA		
<u>Rupiah</u>		
PT Bank Negara Indonesia Tbk	6.400.000.000	17.700.000.000
SETARA KAS - REKSADANA		
<u>Rupiah</u>		
PT Bank Central Asia Tbk	-	500.000
JUMLAH KAS DAN SETARA KAS	50.034.331.087	64.166.199.514

Deposito berjangka memperoleh tingkat bunga sebesar 4,6% - 5,0% dan 4,5% - 6,0% masing-masing pada periode 30 September 2019 dan 2018.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 September 2019
Dan Periode Sembilan Bulan yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan Lain)

6. PIUTANG USAHA – BERSIH

Akun ini terdiri dari:

a. Berdasarkan pelanggan

	30 September 2019	31 Desember 2018
	(Tidak diaudit)	(Diaudit)
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Ekspor</u>		
Origin by Alpine	12.021.861.963	11.401.942.068
IKEA Distribution Services	7.646.754.618	13.186.090.617
Alpine Furniture Inc	18.428.201.448	16.024.204.042
The Home Depot	-	7.491.866.411
Costco Wholesale Corporation	30.816.017.428	82.552.810.235
Target Store	12.855.585.783	23.082.386.570
China National Forest Products Industry Corporation	20.787.788.783	3.717.982.245
American Furniture Manufacture Inc	8.293.601.606	3.796.660.293
Dekker Hout Den Haag B.V	-	4.957.732.537
Canadian Tire	11.761.707.249	5.801.895.192
DMI Furniture Inc.	14.593.090.053	4.539.634.209
Freed Meyer	12.719.849.238	-
Coaster Company Of America	9.288.508.667	4.769.959.583
Composite Technology International	48.904.887.481	7.105.223.770
Wonderwood Import & Export Sdn Bhd	13.794.461.101	
Oscar Eagle Co Ltd	6.810.178.220	
Wood Sheng Ltd	7.899.610.303	
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 3 miliar)	34.431.929.286	27.292.680.647
Sub Jumlah	271.054.033.227	215.721.068.419

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYACATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT

Tanggal 30 September 2019

Dan Periode Sembilan Bulan yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan Lain)

6. PIUTANG USAHA – BERSIH (LANJUTAN)

a. Berdasarkan pelanggan

Lokal

PT City Neonindo Indah Murni	-	3.000.005.002
PT Kayu Lapis Asli Murni	30.936.450.096	19.611.600.930
PT Kayu Alam Perkasa Raya	-	8.099.332.210
PT Balikpapan Forest Industries	-	11.969.384.332
PT Barito Nusantara Indah	-	39.166.075.720
PT Strata Pacific	18.172.735.408	16.088.039.495
PT Paramitra Multi Prakasa	-	13.470.015.522
PT Putra Rato Mahkota	-	9.676.686.397
PT Artha Jasa Totalindo	-	7.008.401.879
PT Binacitra Teknologi Indonesia	-	6.827.143.746
PT Sultan Sukses Mandiri	-	6.470.052.302
PT Air Sirih Bersinar	-	6.442.838.066
PT Putri Tonggi Mandiri	-	5.170.897.677
PT Arysna Mandiri	-	4.323.031.153
PT Gunung Soro Mandi	-	9.675.310.485
Dinas Pendidikan Kota Surabaya	12.218.501.933	-
PT Hagitasinar Lestarimegah	-	10.788.217.746
PT Wijaya Karya Nusacipta	-	5.476.340.998
CV Intraco	20.106.655.137	34.462.991.418
Bidang Pembinaan SMK	43.052.273.000	-
Muntholib	7.343.892.750	-
PT Jatim Sentra Utama	3.015.973.500	-
PT Segara Timber	4.308.543.303	-
PT Indo Veneer Utama	3.460.961.014	-
PT Oceanias Timber Products	4.131.963.660	-
PT Dharma Wood Agung Industri	5.120.809.664	-
PT Panca Usaha Palopo Plywood	4.697.018.519	-
PT Gunung Putra Mandiri	3.708.172.515	-
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 3 miliar)	43.369.606.566	27.353.275.667

Sub Jumlah**203.643.557.065****245.079.640.745****Jumlah****474.697.590.292****460.800.709.164**

Cadangan kerugian

penurunan nilai

-

(607.013.127)

Jumlah - Bersih**474.697.590.292****460.193.696.037**

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT**

Tanggal 30 September 2019

Dan Periode Sembilan Bulan yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan Lain)**6. PIUTANG USAHA – BERSIH (LANJUTAN)****c. Berdasarkan mata uang**

	30 September 2019 (Tidak diaudit)	31 Desember 2018 (Diaudit)
Rupiah	211.290.311.683	257.658.718.235
Dollar Amerika Serikat (US\$18.583.835 dan US\$ 13.986.256 masing- masing pada periode 30 September 2019 dan Tahun 2018)	263.407.278.609	202.534.977.802
Sub Jumlah	474.697.590.292	460.193.696.037

d. Berdasarkan umur

	30 September 2019 (Tidak diaudit)	31 Desember 2018 (Diaudit)
1 - 30 hari	368.083.525.038	375.078.693.050
31 - 60 hari	81.075.435.869	41.126.555.009
61 – 90 hari	25.538.629.385	30.425.146.019
> 90 hari	-	13.563.301.959
Sub Jumlah	474.697.590.292	460.193.696.037

7. PIUTANG LAIN-LAIN

Piutang lain-lain terdiri dari:

	30 September 2019 (Tidak diaudit)	31 Desember 2018 (Diaudit)
<u>Pihak ketiga</u>		
PT Strata Pacific	49.333.842.192	105.597.262.732
PT Tawotu	13.931.850.249	6.461.700.399
Simphoni	842.084.562	-
Karyawan	597.170.856	-
PT Raden	984.769.429	-
Lain-lain	-	8.115.954.201
Sub Jumlah	65.689.717.288	120.174.917.332

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan piutang lain-lain, manajemen berpendapat bahwa tidak ada penurunan piutang.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT**

Tanggal 30 September 2019

Dan Periode Sembilan Bulan yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan Lain)

8. PERSEDIAAN

	30 September 2019 (Tidak diaudit)	31 Desember 2018 (Diaudit)
<u>Manufaktur</u>		
Bahan baku dan pembantu	839.991.638.627	847.763.369.126
Barang dalam proses	367.973.115.484	222.698.104.081
Barang jadi	342.849.433.802	163.413.383.920
Barang dalam perjalanan	3.118.783.796	19.987.155.017
<u>Kehutanan</u>		
Bahan baku dan pembantu	178.202.407.201	147.301.802.481
<u>Perdagangan</u>		
Barang dagangan	36.321.065.098	30.819.180.102
Jumlah	1.768.456.444.008	1.431.982.994.727

Berdasarkan penelaahan terhadap kondisi fisik dan tingkat perputaran persediaan, manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada persediaan usang, oleh karena itu tidak dibentuk penyisihan atas persediaan usang.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT**

Tanggal 30 September 2019

Dan Periode Sembilan Bulan yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan Lain)

9. PAJAK DIBAYAR DI MUKA

Akun ini terdiri dari:

	30 September 2019 (Tidak diaudit)	31 Desember 2018 (Diaudit)
Pajak Pertambahan Nilai	97.020.371.626	69.758.123.129
Pajak penghasilan:		
Pasal 22	553.626.494	-
Pasal 23	2.072.628	-
Pasal 25	15.285.258.096	-
Jumlah	112.861.328.844	69.758.123.129

Sampai dengan tanggal 30 September 2019, jumlah pajak yang telah dibayarkan dicatat sebagai bagian dari akun "Pajak dibayar di muka" karena Kelompok Usaha masih belum memperoleh persetujuan dari otoritas perpajakan pada akhir periode pelaporan.

10. UANG MUKA PEMBELIAN

Akun ini terdiri dari uang muka pembelian atas:

	30 September 2019 (Tidak diaudit)	31 Desember 2018 (Diaudit)
Aset tetap	357.832.752.205	296.472.940.692
Persediaan	206.555.048.312	135.919.671.588
Lain-lain	2.303.362.373	28.444.573.613
Jumlah	566.691.162.890	460.837.185.893
Disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai:		
Aset lancar	228.353.948.936	164.364.245.201
Aset tidak lancar	338.337.213.954	296.472.940.692
Jumlah	566.691.162.890	460.837.185.893

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 September 2019
Dan Periode Sembilan Bulan yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan Lain)

11. ASET TETAP – BERSIH DAN PROPERTI INVESTASI

30 September 2019

Nilai tercatat	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Impairment	Pengurangan	Saldo Akhir
Pemilikan langsung							
Tanah	1.011.753.780.001	53.970.877.885				-	1.065.724.657.886
Bangunan	536.746.681.360	22.065.395.141				-	558.812.076.501
Sarana prasarana	56.284.369.451					-	56.284.369.451
Instalasi listrik	38.539.288.138	99.869.435				-	38.639.157.573
Mesin dan peralatan	253.343.189.583	46.266.101.324	9.940.513.951	(18.153.965.592)		-	271.514.811.364
Alat-alat berat	185.288.260.247	800.000.000				-	186.088.260.247
Kendaraan	84.172.717.021	7.633.855.691	2.885.595.040	(1.005.500.000)		-	87.915.477.672
Inventaris Kantor	16.611.252.285	1.433.714.996				-	18.044.967.281
Inventaris Camp	1.298.125.168					-	1.298.125.168
Inventaris Pabrik	5.047.759.747	336.995.679				-	5.384.755.426
Inventaris Toko	1.815.947.657			989.094.253		-	2.805.041.910
Sub-jumlah	2.190.901.370.658	132.606.810.151	12.826.108.991	(18.170.371.339)		-	2.292.511.700.479
Aset dalam							
penyelesaian	74.942.279.317	80.390.253.562	-	(9.027.910.748)		-	146.304.622.131
Aset sewa							
pembiayaan	70.320.194.684	6.947.196.454	5.201.622.900	28.398.522.515		-	100.464.290.753
Aset tetap dalam							
rangka bangun,							
kelola dan alih	3.271.085.175	-	-			-	3.271.085.175
Jumlah	2.339.434.929.834	219.944.260.167	18.027.731.891	1.200.240.428		-	2.542.551.698.538
Akumulasi							
penyusutan							
Pemilikan langsung							
Bangunan	10.788.717.813	35.806.993.879				-	46.595.711.692
Sarana prasarana	26.199.673.449	4.089.522.190				-	30.289.195.639
Instalasi listrik	17.788.930.656	2.970.845.143				-	20.759.775.799
Mesin dan peralatan	118.152.788.587	11.079.337.435	2.185.295.610	(718.274.286)		-	126.328.556.126
Alat-alat berat	150.822.762.085	9.042.725.123				-	159.865.487.208
Kendaraan	46.410.474.701	4.557.007.010	1.052.754.374	(26.473.957)		-	49.888.253.380
Inventaris Kantor	12.876.567.649	1.580.116.068				-	14.456.683.717
Inventaris Camp	1.118.198.315	65.283.606				-	1.183.481.921
Inventaris Pabrik	3.402.680.000	310.796.028				-	3.713.476.028
Inventaris Toko	1.515.870.734	185.982.601				-	1.701.853.335
Sub-jumlah	389.076.663.989	69.688.609.083	3.238.049.984	(744.748.243)		-	454.782.474.845
Aset sewa							
pembiayaan	17.031.441.847	5.954.043.558	1.413.804.844			-	21.571.680.561
Aset tetap dalam							
rangka bangun,							
kelola dan alih	332.268.960	129.653.658	-			-	461.922.618
Jumlah	406.440.374.796	75.772.306.299,0	4.651.854.828	(744.748.243)		-	476.816.078.024
Nilai Buku	1.932.994.555.038						2.065.735.620.514

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 September 2019
Dan Periode Sembilan Bulan yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan Lain)

31 Desember 2018							
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Impairment	Penurunan Nilai Aset	Saldo Akhir
Nilai tercatat							
Pemilikan langsung							
Tanah	814.560.000.000	52.833.881.843	-	42.047.771.345	102.312.126.813	-	1.011.753.780.001
Bangunan	467.592.197.211	17.511.887.637	-	56.543.485.037	(18.889.490.919)	(343.942.499)	522.414.136.467
Sarana prasarana	70.561.234.844	-	-	-	-	-	70.561.234.844
Instalasi listrik	33.703.872.701	-	-	4.926.783.690	-	(91.368.253)	38.539.288.138
Mesin dan peralatan	248.909.964.000	19.396.313.571	23.737.955.124	28.114.320.623	-	(19.339.453.488)	253.343.189.582
Alat-alat berat	165.134.032.402	2.121.000.000	748.829.419	18.782.057.264	-	-	185.288.260.247
Kendaraan	82.244.930.536	4.218.078.400	1.639.213.649	1.398.546.734	-	(1.069.485.000)	85.152.857.021
Inventaris Kantor	15.554.493.218	1.510.704.319	17.527.273	-	-	(436.417.979)	16.611.252.285
Inventaris Camp	1.280.150.168	17.975.000	-	-	-	-	1.298.125.168
Inventaris Pabrik	5.084.712.902	298.572.924	-	-	-	(335.526.079)	5.047.759.747
Inventaris Toko	1.603.414.989	156.853.169	-	111.359.000	-	-	1.871.627.158
Sub-jumlah	1.906.229.002.971	98.065.266.863	26.143.525.465	151.924.323.693	83.422.635.894	(21.616.193.298)	2.191.881.510.658
Aset dalam							
penyelesaian	93.827.799.738	82.816.487.894	1.834.780.227	(99.690.784.147)	-	(176.443.940)	74.942.279.318
Aset sewa							
pembiayaan	57.533.913.946	30.700.112.822	-	(17.477.252.071)	-	(1.416.720.013)	69.340.054.684
Aset tetap dalam							
rangka bangun, kelola dan alih	21.514.084.246	748.784.354	-	(18.991.783.425)	-	-	3.271.085.175
Jumlah	2.079.104.800.901	212.330.651.933	27.978.305.692	15.764.504.050	83.422.635.894	(23.209.357.251)	2.339.434.929.835
Akumulasi							
 penyusutan							
Pemilikan langsung							
Bangunan	33.876.284.160	30.611.048.833	-	12.421.737.676	(70.170.309.900)	(12.696.818)	6.726.063.951
Sarana prasarana	24.313.720.736	6.331.441.567	-	(382.834.992)	-	-	30.262.327.311
Instalasi listrik	13.753.164.156	3.653.863.362	-	382.834.992	-	(931.854)	17.788.930.656
Mesin dan peralatan	111.823.184.599	13.854.167.509	3.702.336.427	699.643.098	-	(3.881.353.930)	118.793.304.849
Alat-alat berat	118.722.050.222	17.248.499.586	748.829.419	15.601.041.698	-	-	150.822.762.087
Kendaraan	47.153.441.783	7.281.687.289	1.378.041.650	359.779.464	-	(327.521.146)	53.089.345.740
Inventaris Kantor	11.066.741.120	1.947.191.680	4.265.148	-	-	(133.100.003)	12.876.567.649
Inventaris Camp	1.025.862.918	92.335.395	-	-	-	-	1.118.198.313
Inventaris Pabrik	3.121.573.723	377.834.640	-	-	-	(96.728.364)	3.402.679.999
Inventaris Toko	1.159.610.308	356.260.427	-	-	-	-	1.515.870.735
Sub-jumlah	366.015.633.725	81.754.330.288	5.833.472.644	29.082.201.936	(70.170.309.900)	(4.452.332.115)	396.396.051.290
Aset sewa							
pembiayaan	21.490.189.712	5.013.521.596	-	(16.660.464.260)	-	(131.192.501)	9.712.054.547
Aset tetap dalam							
rangka bangun, kelola dan alih	11.658.376.414	1.095.630.222	-	(12.421.737.676)	-	-	332.268.960
Jumlah	399.164.199.851	87.863.482.106	5.833.472.644	-	(70.170.309.900)	(4.583.524.616)	406.440.374.797
Nilai Buku	1.679.940.601.050						1.932.994.555.038

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT**

Tanggal 30 September 2019

Dan Periode Sembilan Bulan yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan Lain)

11. ASET TETAP – BERSIH DAN PROPERTI INVESTASI (LANJUTAN)

Nilai wajar tanah dan bangunan ditentukan dengan menggunakan metode pendekatan pasar dan biaya. Hal ini berarti penilaian yang dilakukan oleh penilai didasarkan pada harga pasar aktif, yang disesuaikan secara signifikan untuk perbedaan pada sifat, lokasi dan kondisi dari tanah dan bangunan yang dinilai. Nilai wajar tanah dan bangunan didasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh KJPP Pung's Zulkarnain & Rekan dan KJPP Hari Utomo & Rekan, penilai independen yang terdaftar pada OJK dalam laporannya masing-masing tanggal 16 November 2018 dan 28 Desember 2018.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai aset tetap pada tanggal 30 September 2019.

Kelompok Usaha memiliki aset tetap tanah dengan Hak Guna Bangunan (HGB) dengan jangka waktu 20-30 tahun. Pada tanggal 30 September 2019, HGB Kelompok Usaha masih memiliki sisa jangka waktu 1-27 tahun. Manajemen berpendapat bahwa jangka waktu HGB tersebut dapat diperbaharui/diperpanjang saat jatuh tempo.

INT, Entitas Anak, terdapat penambahan aset tetap yang terdiri dari reklasifikasi dari properti investasi sebesar Rp 15.880.000.000 pada tahun 2018.

Kelompok Usaha mengadakan perjanjian sewa pembiayaan berupa mesin dan kendaraan dengan PT Orix Indonesia Finance, CV Surya Mas Motor, PT BFI Finance Indonesia Tbk, PT BCA Finance, PT Century Tokyo Leasing Indonesia, PT Mitsui Leasing Capital Indonesia dan IBJ Verena dengan jangka waktu 24 sampai 48 bulan.

12. ASET LAIN-LAIN – BERSIH

Akun ini terdiri dari:

	30 September 2019 (Tidak diaudit)	31 Desember 2018 (Diaudit)
Biaya pengelolaan hak		
pengusahaan hutan, bersih	5.359.228.115	5.778.312.674
Aset tetap - pengampunan		
pajak - bersih	619.500.000	714.000.000
Lain-lain	2.695.476.540	197.555.923
Jumlah	8.674.204.655	6.689.868.597

Kelompok Usaha memiliki hak pengelolaan hutan ("HPH") dengan jangka waktu 45-55 tahun. Pada tanggal 30 September 2019, HPH Kelompok Usaha masih memiliki sisa jangka waktu 35-50 tahun. Manajemen berpendapat bahwa jangka waktu HPH tersebut dapat diperbaharui/diperpanjang saat jatuh tempo.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT**

Tanggal 30 September 2019

Dan Periode Sembilan Bulan yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan Lain)**13. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK**

- a. Utang bank dan lembaga keuangan bukan bank jangka pendek terdiri dari:

	30 September 2019 (Tidak diaudit)	31 Desember 2018 (Diaudit)
<u>Perusahaan</u>		
<u>Pihak ketiga</u>		
Indonesia Eximbank		
Fasilitas kredit modal		
kerja ekspor I		
(US\$ 5.000.000 dan		
Rp 133.450.000.000		
pada periode 30 September 2019;		
dan US\$ 5.000.000 dan		
Rp 133.450.000.000 pada		
Tahun 2018)	204.320.000.000	205.855.000.000
Fasilitas kredit modal		
kerja ekspor II	280.000.000.000	263.029.431.946
Fasilitas kredit modal		
kerja ekspor III	66.725.000.000	66.725.000.000
Fasilitas kredit modal		
kerja ekspor VIII	100.000.000.000	-
PT Bank Negara Indonesia		
(Persero) Tbk		
Revolving loan	3.242.029.032	26.734.761.934
The Hongkong and		
Shanghai Banking Corp, Ltd		
Loan against export	198.559.647.230	79.699.459.009
Technical Documents Against Acceptance	-	40.300.540.991
Revolving loan	-	12.000.000.000
PT Bank Danamon Indonesia Tbk		
Fasilitas Kredit Berjangka	70.000.000.000	-
Fasilitas Kredit Rekening Koran (Revolving)	11.980.495.076	-
Sub-jumlah	934.827.171.338	694.344.193.880

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 September 2019
Dan Periode Sembilan Bulan yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan Lain)

13. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (LANJUTAN)

Entitas Anak

Pihak ketiga

Indonesia Eximbank

Fasilitas kredit modal

kerja ekspor I

140.000.000.000

205.000.000.000

Fasilitas kredit modal

kerja Tranche A dan B

-

174.276.828.311

Fasilitas kredit modal

kerja ekspor II

150.000.000.000

148.500.000.000

Fasilitas kredit modal

kerja ekspor IV

80.000.000.000

80.000.000.000

Fasilitas kredit modal

Kerja Ekspor

Transaksional

380.000.000.000

145.560.000.000

The Hongkong and

Shanghai Banking Corp, Ltd

Loan against export

67.500.000.000

112.500.000.000

PT Bank Negara Indonesia

(Persero) Tbk

KMK-Revolving loan facility

6.609.255.924

6.310.795.416

PT Bank ICBC Indonesia

Pre-export financing

Non-LC

(US\$ 2.000.000 dan US\$ 2.000.000

28.348.000.000

28.962.000.000

pada September 2019 dan Desember 2018)

PT Bank Central Asia, Tbk

Fasilitas Kredit Lokal

13.477.879.431

-

Fasilitas Kredit Ekspor

30.000.000.000

-

Fasilitas Kredit Time Loan Revolving

15.000.000.000

-

Sub-jumlah

910.935.135.355

901.109.623.727

Jumlah

1.845.762.306.693

1.595.453.817.607

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 September 2019
Dan Periode Sembilan Bulan yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan Lain)

13. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (LANJUTAN)

a. Utang bank dan lembaga keuangan bukan bank jangka panjang terdiri dari:

	30 September 2019 (Tidak diaudit)	31 Desember 2018 (Diaudit)
<u>Perusahaan</u>		
<u>Pihak ketiga</u>		
Indonesia Eximbank		
investasi ekspor VII	174.800.000.000	3.083.060.869
PT BCA Finance	232.428.695	653.803.768
Sub-jumlah	175.032.428.695	3.736.864.637
<u>Entitas Anak</u>		
<u>Pihak ketiga</u>		
The Hongkong and		
Shanghai Banking Corp, Ltd		
Fasilitas kredit investasi Ekspor	36.562.500.000	-
Indonesia Eximbank		
Fasilitas kredit investasi Ekspor	52.406.333.328	55.999.999.990
Fasilitas kredit Modal Kerja	-	-
Ekspor II	-	14.583.333.338
PT Bank Central Asia, Tbk	36.708.333.332	-
PT BCA Finance	1.561.660.506	1.899.513.332
Leasing	-	35.866.747
Sub-jumlah	127.238.827.166	72.518.713.407
Jumlah	302.271.255.861	76.255.578.044
Bagian Jatuh Tempo dalam		
waktu satu tahun	(33.825.016.364)	(38.330.004.655)
Bagian Jangka Panjang	268.446.239.497	37.925.573.389

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT

Tanggal 30 September 2019

Dan Periode Sembilan Bulan yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan Lain)

13. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (LANJUTAN)

Perusahaan

Pada bulan September 2012, Perusahaan mendapat tambahan fasilitas kredit modal kerja ekspor II (KMKE II) dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang disebut juga Indonesia Eximbank ("Exim") dengan batas maksimum sebesar Rp 70 miliar. Pada tanggal 6 November 2017, Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas kredit modal kerja ekspor II (KMKE II) dengan batas maksimum menjadi sebesar Rp 170 miliar. Pada tanggal 21 Desember 2018, Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas kredit modal kerja ekspor II (KMKE II) dengan batas maksimum menjadi sebesar Rp 430 miliar.

Pada bulan Desember 2010, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari Exim berupa fasilitas kredit modal kerja ekspor I (KMKE I) dengan batas maksimum sebesar US\$ 15.000.000 dan fasilitas negosiasi wesel ekspor (NWE) dengan batas maksimum sebesar US\$ 1.000.000 yang menggunakan mata uang Rupiah dengan kurs yang berlaku pada saat pencairan. Pada tahun 2018, Perusahaan memperoleh perubahan batas maksimum fasilitas kredit KMKE I menjadi sebesar US\$ 5.000.000 (Tranche A) dan Rp 133,45 miliar (Tranche B).

Pada bulan September 2012, Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas kredit modal kerja ekspor III (KMKE III) dan kredit modal kerja ekspor IV (KMKE IV) dari Exim dengan batas maksimum masing-masing sebesar Rp 66,725 miliar dan Rp 80 miliar. Sampai dengan 31 Desember 2018, Perusahaan belum menggunakan fasilitas KMKE IV.

Fasilitas pinjaman ini dibebani bunga sebesar 9,65% per tahun untuk pinjaman dalam mata uang Rupiah masing-masing pada tahun 2019 dan 2018 dan 6% dan 5,8% per tahun untuk pinjaman dalam mata uang Dolar Amerika Serikat masing-masing pada tahun 2019 dan 2018. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 22 Desember 2019. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan aset tetap, piutang usaha, persediaan tertentu milik Perusahaan serta jaminan pribadi sebagian direksi Perusahaan.

Pada tanggal 22 Mei 2019, perusahaan memperoleh tambahan fasilitas dari Bank Jatim berupa kredit modal kerja Keppres dengan batas maksimum sebesar Rp 8,5 miliar sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019. Fasilitas ini dijamin dengan aset tetap dan deposito berjangka.

Pada tanggal 18 Oktober 2018, Perusahaan memperoleh fasilitas revolving loan, loan against export dan technical documents against acceptance dari PT Bank HSBC Indonesia ("HSBC") dengan batas maksimum masing-masing sebesar Rp 12 miliar, Rp 120 miliar dan Rp 120 miliar. Fasilitas ini dibebani bunga sebesar 7,5% per tahun di bawah Best Lending Rate pada tahun 2018. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 31 Agustus 2019 dan dijamin dengan piutang usaha, persediaan dan aset tetap tertentu milik Perusahaan.

Perusahaan terikat dengan beberapa batasan, antara lain:

- Rasio lancar minimum 1x.
- Rasio gearing maksimum 1x.
- Interest service coverage ratio minimum 1,25x.
- Rasio pembiayaan maksimum 90%.

Pada tanggal 31 Juli 2017, Perusahaan memperoleh fasilitas revolving loan dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI") dengan batas maksimum sebesar Rp 30 miliar yang digunakan untuk modal kerja. Fasilitas ini dibebani bunga sebesar 11% per tahun masing-masing pada tahun 2018 dan 2017. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 28 Mei 2019 dan dijamin dengan aset tetap tertentu milik Perusahaan, dan corporate guarantee dari IIL.

Perusahaan terikat dengan beberapa batasan, antara lain:

- Rasio lancar minimum 1x.
- Rasio debt service coverage minimum 1,25x.
- Rasio gearing eksternal maksimum 1x.

Entitas Anak

Pada tanggal 14 Desember 2018, ITR, entitas anak, memperoleh fasilitas kredit modal kerja ekspor I (KMKE I) dari Exim dengan batas maksimum sebesar Rp 205 miliar yang digunakan untuk modal kerja. Fasilitas ini dibebani bunga sebesar 10% per tahun pada tahun 2018. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 13 Desember 2019. Fasilitas ini dijamin dengan piutang usaha, persediaan, aset tetap tertentu milik ITR, dan corporate guarantee dari Perusahaan.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT

Tanggal 30 September 2019

Dan Periode Sembilan Bulan yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan Lain)

13. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (LANJUTAN)

Pada tanggal 14 Desember 2018, ITK, entitas anak, memperoleh fasilitas kredit modal kerja ekspor (KMKE) Tranche A dan B dari Exim dengan batas maksimum masing-masing sebesar Rp 97 miliar dan Rp 78 miliar. Fasilitas ini dibebani bunga sebesar 9,7% per tahun pada tahun 2018 dan akan jatuh tempo pada tanggal 13 Desember 2019. Fasilitas ini dijamin dengan persediaan, piutang usaha dan aset tetap tertentu milik ITK, dan corporate guarantee dari Perusahaan.

Pada tanggal 5 Desember 2016, BRT, entitas anak, memperoleh fasilitas kredit modal kerja ekspor II (KMKE II) dari Exim dengan batas maksimum sebesar Rp 150 miliar. Pada tahun 2018, BRT memperoleh peningkatan batas maksimum fasilitas menjadi Rp 430 miliar. Fasilitas pinjaman ini dibebani bunga sebesar 9,65% dan 10% per tahun masing-masing pada tahun 2018 dan 2017. Fasilitas ini diperpanjang hingga 22 Desember 2019.

Pada tanggal 7 September 2016, INT, entitas anak, memperoleh fasilitas kredit modal kerja ekspor Transaksional (KMKE Transaksional) dari Exim dengan batas maksimum sebesar Rp 79 miliar. Pada tahun 2018, INT memperoleh peningkatan batas maksimum fasilitas menjadi Rp 159 miliar. Fasilitas ini dibebani bunga sebesar 10% per tahun masing-masing pada tahun 2018 dan 2017 dan akan jatuh tempo pada tanggal 19 September 2019. Fasilitas ini dijamin dengan piutang usaha, persediaan dan aset tetap tertentu milik INT.

Pada tanggal 12 April 2019, entitas anak, memperoleh fasilitas kredit dari BCA berupa kredit lokal dengan batas maksimum sebesar Rp 15 miliar, kredit Time Loan Revolving dengan batas maksimum sebesar Rp 15 miliar dan kredit ekspor dengan batas maksimum sebesar Rp 30 miliar. Fasilitas tersebut di bebani bunga masing-masing sebesar 10,5%, 10,25% dan 10,25% dan akan jatuh tempo pada tanggal 12 April 2020. Fasilitas ini dijamin dengan aset tetap.

Sejak tahun 2013, BRT, entitas anak, memperoleh fasilitas pembiayaan modal kerja ekspor IV (KMKE IV) untuk Kelompok Usaha (BRT, Perusahaan, dan NKT) dari Exim dengan batas maksimum sebesar Rp 80 miliar yang digunakan untuk modal kerja BRT dengan jangka waktu 1 tahun dan dibebani bunga 9,65% dan 9,5% per tahun masing-masing pada tahun 2018 dan 2017. Fasilitas ini diperpanjang hingga 22 Desember 2019.

Kelompok Usaha terikat dengan beberapa batasan, antara lain Kelompok Usaha harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu untuk:

- Mengubah anggaran dasar atau mengubah status perusahaan.
- Melakukan konsolidasi usaha, penyertaan modal atau pembelian saham perusahaan lain.
- Melakukan merger atau akuisisi, kecuali menurut kebijakan pemerintah
- Membagikan dividen saham atau keuntungan usaha dalam bentuk apapun juga dan dalam jumlah berapapun juga kepada pemegang saham.
- Memelihara rasio keuangan yakni rasio debt to equity maksimal 3x.

Pada tanggal 18 Oktober 2018, ITR, entitas anak, memperoleh fasilitas kredit loan against export dari HSBC dengan batas maksimum sebesar US\$ 5.000.000 setara Rupiah Rp 67,5 miliar. Fasilitas ini dibebani bunga sebesar 7,5% per tahun di bawah Best Lending Rate pada tahun 2018. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 30 April 2019 dan dijamin dengan piutang usaha, persediaan dan aset tetap tertentu milik ITR.

Pada tahun 2014, ITR, entitas anak, memperoleh fasilitas kredit pre-export financing non-LC dari PT Bank ICBC Indonesia dengan batas maksimum sebesar US\$ 2.500.000. Pada tahun 2018, ITR memperoleh penurunan batas maksimum fasilitas menjadi US\$ 2.000.000. Fasilitas ini dibebani bunga sebesar 6% dan 5,75% per tahun masing-masing pada tahun 2018 dan 2017 dan akan jatuh tempo pada tanggal 26 September 2019. Fasilitas ini dijamin dengan piutang usaha dan persediaan tertentu milik ITR dan jaminan pribadi dari Halim Rusli, Hendro Rusli dan Widjaja Karli.

Pada tanggal 29 Agustus 2017, INT, entitas anak, memperoleh fasilitas kredit revolving loan dari BNI dengan batas maksimum sebesar Rp 10 miliar yang digunakan untuk modal kerja. Fasilitas ini dibebani bunga sebesar 11% per tahun masing-masing pada tahun 2018 dan 2017. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 28 Mei 2019 dan dijamin dengan piutang usaha, persediaan, aset tetap tertentu milik INT, corporate guarantee dari IIL dan personal guarantee dari Stephanie Kane Ilham.

Pada tanggal 10 Desember 2015, ITK, entitas anak, mengubah fasilitas kredit modal kerja menjadi fasilitas kredit revolving loan dengan batas maksimum menjadi sebesar Rp 77 miliar dari BNI. Pada tanggal 22 Desember 2016, ITK mengubah fasilitas kredit revolving loan menjadi fasilitas cerukan dengan batas maksimum menjadi sebesar Rp 97 miliar.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT

Tanggal 30 September 2019

Dan Periode Sembilan Bulan yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan Lain)

13. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (LANJUTAN)

Pada tanggal 2 Maret 2017, ITK, entitas anak, memperoleh fasilitas kredit revolving loan dari BNI dengan batas maksimum sebesar Rp 78 miliar yang digunakan untuk modal kerja. ITK telah melunasi pinjaman tersebut pada bulan Desember 2018.

Fasilitas ini dibebani bunga sebesar 11% per tahun masing-masing pada tahun 2018 dan 2017. Fasilitas ini dijamin dengan persediaan, aset tetap tertentu ITK, dan personal guarantees dari Widjaja Karli, Halim Rusli dan Hendro Rusli.

Pada tanggal 2 Maret 2017, ITR, entitas anak, memperoleh fasilitas kredit revolving loan dari BNI dengan batas maksimum sebesar Rp 205 miliar yang digunakan untuk modal kerja. Fasilitas ini dibebani bunga sebesar 11% per tahun masing-masing pada tahun 2018 dan 2017. Fasilitas ini dijamin dengan piutang usaha, persediaan, aset tetap tertentu milik ITR, dan personal guarantee dari Halim Rusli. Seluruh fasilitas pinjaman telah dilunasi pada tanggal 19 Desember 2018 dan diambil alih oleh Indonesia Eximbank.

Entitas anak terikat dengan beberapa batasan antara lain, entitas anak harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu untuk:

- Mengubah status hukum perusahaan dan mengubah anggaran dasar.
- Menggunakan dana perusahaan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari bank.
- Menjual atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain. • Selling or pledging the company's asset to other parties.
- Membagi laba usaha dan membayar dividen kepada pemegang saham
- Melakukan merger, akuisisi atau reorganisasi atau investasi atau penyertaan pada perusahaan lain.
- Mengubah bidang usaha.
- Menarik kembali modal yang disetor.
- Memenuhi rasio keuangan sebagai berikut:
 - a) Rasio lancar minimal 1x.
 - b) Rasio debt to equity maksimal 2,5x.
 - c) Rasio debt service coverage minimal 100%.
 - d) Rasio piutang dan persediaan terhadap jumlah fasilitas kredit modal kerja minimal 110%.

Pada tanggal 15 Desember 2017, WII, entitas anak tidak langsung, memperoleh tambahan fasilitas kredit term loan dari PT Bank Mizuho Indonesia dengan batas maksimum sebesar US\$ 8.000.000. Fasilitas ini telah jatuh tempo pada tanggal 30 Maret 2018.

Pada tanggal 15 Desember 2016, WII, entitas anak tidak langsung, memperoleh fasilitas kredit revolving loan dari PT Bank Mizuho Indonesia dengan batas maksimum sebesar US\$ 2.000.000. Fasilitas ini telah jatuh tempo pada tanggal 15 Desember 2018.

Pada tanggal 20 Oktober 2017, WII, entitas anak tidak langsung, memperoleh fasilitas kredit uncommitted short term loan dari The Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ Ltd dengan batas maksimum sebesar US\$ 2.000.000. Fasilitas ini dibebani bunga sebesar 2,1%-2,28% per tahun pada tahun 2017. Fasilitas ini telah jatuh tempo pada tanggal 20 Oktober 2018 dan dijamin dengan corporate guarantee dari WoodOne Co, Ltd.

Pada tahun 2018, WII tidak dikonsolidasikan lagi ke dalam Kelompok Usaha.

Utang bank dan lembaga keuangan bukan bank jangka panjang

Perusahaan

Pada bulan Maret 2015, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja ekspor transaksional dan fasilitas kredit investasi ekspor IV dari Exim dengan batas maksimum masing-masing sebesar Rp 54 miliar dan Rp 46 miliar. Fasilitas ini akan jatuh tempo masing-masing pada bulan Mei 2018 dan April 2019. Perusahaan telah melunasi pinjaman kredit modal kerja ekspor transaksional pada bulan Mei 2018.

Fasilitas pinjaman di atas dibebani bunga sebesar 9,65% dan 10% per tahun masing-masing pada tahun 2018 dan 2017. Fasilitas pinjaman dijamin dengan aset tetap tertentu, piutang usaha, persediaan Perusahaan serta personal guarantee sebagian direksi Perusahaan.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT

Tanggal 30 September 2019

Dan Periode Sembilan Bulan yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan Lain)

13. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (LANJUTAN)

Pada tahun 2016-2018, Perusahaan mengadakan perjanjian kredit kepemilikan kendaraan dengan PT BCA Finance yang terutang dalam angsuran bulanan sampai dengan 2019-2021. Fasilitas ini dibebani bunga sebesar 4,18%-5,69% per tahun masing-masing pada tahun 2018 dan 2017.

Pada tahun 2019, Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas kredit modal kerja ekspor VII dari Exim dengan batas maksimum sebesar Rp 200 miliar sampai dengan tahun 2022. Fasilitas pinjaman ini di bebani dengan bunga sebesar 9,65% per tahun dan dijamin dengan persediaan dan piutang usaha.

Entitas Anak

Pada tanggal 12 April 2019, INT, entitas anak, memperoleh fasilitas kredit Investasi dari BCA dengan batas maksimum sebesar Rp 40 miliar. Fasilitas ini di bebani bunga sebesar 10,25% per tahun dan akan di bayar dengan angsuran 60 bulan sejak tanggal penarikan fasilitas. Fasilitas ini dijamin dengan aset tetap.

Pada tanggal 14 Desember 2018, ITK, entitas anak, memperoleh fasilitas kredit investasi ekspor (KIE) dari Exim dengan batas maksimum sebesar Rp 62 miliar. Fasilitas ini terutang dalam angsuran bulanan hingga 16 Juni 2021 dan dibebani bunga sebesar 10% per tahun pada tahun 2018. Fasilitas ini dijamin dengan piutang usaha, persediaan, aset tetap tertentu ITK, dan corporate guarantee dari Perusahaan.

Pada tanggal 14 Desember 2018, ITR, entitas anak, memperoleh fasilitas kredit modal kerja ekspor II (KMKE II) dari Exim dengan batas maksimum sebesar Rp 18 miliar. Fasilitas ini terutang dalam angsuran bulanan hingga 6 Maret 2020 dan dibebani bunga sebesar 10,2% per tahun pada tahun 2018. Fasilitas ini dijamin dengan piutang usaha, persediaan, aset tetap tertentu ITR, dan corporate guarantee dari Perusahaan.

Pada tahun 2015-2017, ITR, ITK dan INT, entitas anak, mengadakan perjanjian kredit kepemilikan kendaraan dengan PT BCA Finance dengan angsuran bulanan hingga tahun 2020. Fasilitas ini dibebani bunga sebesar 3,6%-7,79% per tahun masing-masing pada tahun 2018 dan 2017.

Pada tahun 2015, ITK, entitas anak, memperoleh fasilitas kredit investasi dari BNI dengan batas maksimum sebesar Rp 112 miliar yang digunakan untuk pembangunan pabrik serta pembelian mesin-mesin produksi di Lamongan.

Fasilitas ini akan dibayar melalui angsuran bulanan selama 60 bulan setelah masa tenggang dan terutang dalam angsuran bulanan hingga 16 Juni 2021. Fasilitas ini dijamin dengan jaminan yang sama dengan fasilitas jangka pendek dan dibebani bunga sebesar 11,5% per tahun masing-masing pada tahun 2018 dan 2017. Seluruh fasilitas pinjaman telah dilunasi pada bulan Desember 2018 dan diambil alih oleh Exim.

Pada tanggal 2 Maret 2017, ITR, entitas anak, memperoleh fasilitas kredit term loan dari BNI dengan batas maksimum sebesar Rp 35 miliar yang digunakan untuk tambahan modal kerja termasuk take over atas fasilitas kredit dari PT Bank HSBC Indonesia.

Fasilitas ini akan dibayar melalui angsuran bulanan selama 36 bulan setelah masa tenggang dan terutang dalam angsuran bulanan hingga 2 Maret 2020. Fasilitas ini dijamin dengan jaminan yang sama dengan fasilitas jangka pendek dan dibebani bunga sebesar 11% per tahun. Seluruh fasilitas pinjaman telah dilunasi pada bulan Desember 2018 dan diambil alih oleh Exim.

Per tanggal 30 September 2019, terdapat saldo cerukan sebesar Rp 35.309.659.463, yang terdiri dari PT Bank Negara Indonesia Tbk sebesar Rp 9.851.284.956,- ; PT Bank central Asia Tbk sebesar Rp 13.477.879.431,- dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk sebesar Rp 11.980.495.076.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT**

Tanggal 30 September 2019

Dan Periode Sembilan Bulan yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan Lain)

14. UTANG USAHA

a. Akun ini terdiri dari utang kepada pemasok sebagai berikut:

	30 September 2019	31 Desember 2018
	(Tidak diaudit)	(Diaudit)
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Impor</u>		
Yea Chiuan Industrial Co Ltd	-	220.109.462
Dalian Guosen	4.381.623.935	-
Leadermac Machinery	2.787.317.100	-
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 2 miliar)	4.863.424.782	1.461.831.661
Sub Jumlah	12.032.365.817	1.681.941.123
<u>Lokal</u>		
PT Akzo Nobel	11.135.576.013	6.649.077.656
PT Propan Raya ICC	7.893.764.004	4.868.837.376
PT Arjuna Utama Kimia	-	4.475.063.753
UD Rimba Sari	4.009.978.248	-
Bapak Riski Yuman Fitrianto	5.601.749.677	-
CV Berkat Abadi	2.831.495.341	-
PT Sherwin Williams Indonesia	-	3.657.269.172
PT Gyung Do Indonesia	2.700.861.833	3.066.202.273
PT Kemasan Ciptatama	-	2.242.276.373
PT Grafitecindo Ciptaprima	-	2.085.154.895
Iwan Tatang (Risfitria)	2.904.223.796	-
PT KAA - Karya Agung Abadi	3.226.741.652	-
CV Surabaya Honeycomb Perkasa	2.051.828.634	-
Bapak Adjie Oenarta	3.641.747.223	-
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 2 miliar)	23.930.263.219	48.416.629.164
Sub Jumlah	69.928.229.640	75.460.510.662
Jumlah	81.960.595.457	77.142.451.785

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT**

Tanggal 30 September 2019

Dan Periode Sembilan Bulan yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan Lain)

14. UTANG USAHA (Lanjutan)

b. Berdasarkan mata uang

	30 September 2019 (Tidak diaudit)	31 Desember 2018 (Diaudit)
Rupiah	69.928.229.640	75.460.510.662
Dollar Amerika Serikat (US\$ 539.773 Dan US\$ 115.526 masing- masing pada September 2019 dan Tahun 2018)	7.650.741.882	1.671.931.210
Thailand Bath (22.500)	-	10.009.913
Chinese RMB (2.186.450)	4.381.623.935	-
Jumlah	81.960.595.457	77.142.451.785

c. Berdasarkan umur

	30 September 2019 (Tidak diaudit)	31 Desember 2018 (Diaudit)
1 - 30 hari	54.958.617.193	63.078.500.013
31 - 60 hari	15.588.658.924	9.598.367.222
61 – 90 hari	11.357.117.725	1.246.106.447
> 90 hari	56.201.615	3.219.478.103
Jumlah	81.960.595.457	77.142.451.785

Utang usaha merupakan utang tanpa jaminan dan tidak dikenakan bunga.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT**

Tanggal 30 September 2019

Dan Periode Sembilan Bulan yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan Lain)

15. UTANG LAIN-LAIN

	30 September 2019 (Tidak diaudit)	31 Desember 2018 (Diaudit)
<u>Pihak berelasi</u>		
PT Integra Indo Lestari	70.716.517.926	127.680.374.413
Sub Jumlah	70.716.517.926	127.680.374.413
<u>Pihak ketiga</u>		
IKEA	2.305.824.241	-
PT Nisrina Rizki Samudera	-	1.245.114.000
PT Bahtera Setia	-	1.074.439.367
Lain-lain		
Masing-masing		
dibawah Rp 1 miliar		
pada tahun 2019)	-	11.849.123.388
Sub Jumlah	2.305.824.241	14.168.676.755
Jumlah	73.022.342.167	141.849.051.168
Disajikan dalam laporan posisi		
keuangan konsolidasian		
sebagai:		
Liabilitas jangka pendek	2.305.824.241	15.302.676.755
Liabilitas jangka panjang	70.716.517.926	126.546.374.413
Jumlah	73.022.342.167	141.849.051.168

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT**

Tanggal 30 September 2019

Dan Periode Sembilan Bulan yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan Lain)**16. PERPAJAKAN**

a. Utang pajak terdiri dari:

	30 September 2019	31 Desember 2018
	Tidak diaudit	Diaudit
Perusahaan		
Pajak penghasilan (PPh):		
Pasal 4 (2)	25.744.019	63.633.777
Pasal 15	856.188	16.932.240
Pasal 21	230.842.951	211.794.188
Pasal 22	16.024.317	15.252.381
Pasal 23	188.410.407	75.579.172
Pasal 25	-	770.745.016
Pasal 29		
Tahun 2018	-	17.986.528.495
Tahun 2019	19.267.740.964	-
Sub-jumlah	19.729.618.846	19.140.465.269
	30 September 2019	31 Desember 2018
	Tidak diaudit	Diaudit
Entitas Anak		
Pajak Pertambahan Nilai	4.155.522.576	9.334.397.499
Pajak penghasilan (PPh):		
Pasal 4 (2)	26.863.999	97.645.968
Pasal 15	23.268.328	23.921.250
Pasal 21	171.541.833	245.051.048
Pasal 22	70.459.380	57.201.342
Pasal 23	874.338.522	570.683.668
Pasal 25	3.832.178.321	1.856.920.958
Pasal 26	3.511.574	3.557.836
Pasal 29		
Tahun 2018	-	30.236.879.213
Tahun 2019	10.502.204.211	-
Sub-jumlah	19.659.888.744	42.426.258.782
Jumlah	39.389.507.590	61.566.724.051

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT

Tanggal 30 September 2019

Dan Periode Sembilan Bulan yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan Lain)

16. PERPAJAKAN (Lanjutan)

b. Pengampunan Pajak

Berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak No. KET-1186/PP/WPJ.24/2017 yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 16 Januari 2017, IKM, Entitas Anak, telah mengikuti program Pengampunan Pajak dengan penambahan aset sebesar Rp 41.200.000 yang dicatat sebagai bagian dari "Kas dan setara kas". Uang tebusan sebesar Rp 1.236.000 telah dibayar IKM pada tanggal 21 Desember 2016 dan dicatat sebagai bagian dari "Beban pajak" dalam "Beban umum dan administrasi".

Berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak No. KET-1369/PP/WPJ.24/2017 yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 16 Januari 2017, ITK, Entitas Anak, telah mengikuti program Pengampunan Pajak dengan penambahan aset sebesar Rp 12.861.855.000. Uang tebusan sebesar Rp 385.855.650 telah dibayar ITK pada tanggal 28 Desember 2016 dan dicatat sebagai bagian dari "Beban pajak" dalam "Beban umum dan administrasi".

Berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak No. KET-906/PP/WPJ.24/2017 yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 12 Januari 2017, ITR, Entitas Anak, telah mengikuti program Pengampunan Pajak dengan penambahan aset sebesar Rp 5.328.950.000. Uang tebusan sebesar Rp 159.868.500 telah dibayar ITR pada tanggal 27 Desember 2016 dan dicatat sebagai bagian dari "Beban pajak" dalam "Beban umum dan administrasi".

Berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak No. KET-3738/PP/WPJ.24/2016 yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 28 September 2016, ITD, Entitas Anak, telah mengikuti program Pengampunan Pajak dengan penambahan aset sebesar Rp 191.251.352. Uang tebusan sebesar Rp 3.825.027 telah dibayar ITD pada tanggal 23 September 2016 dan dicatat sebagai bagian dari "Beban pajak" dalam "Beban umum dan administrasi".

Berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak No. KET-3120/PP/WPJ.24/2016 yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 27 September 2016, INT, Entitas Anak, telah mengikuti program Pengampunan Pajak dengan penambahan aset sebesar Rp 51.500.000 yang dicatat sebagai bagian dari "Kas dan setara kas". Uang tebusan sebesar Rp 1.030.000 telah dibayar INT pada tanggal 23 September 2016 dan dicatat sebagai bagian dari "Beban pajak" dalam "Beban umum dan administrasi".

Berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak No. KET-2152/PP/WPJ.14/2016 yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 27 September 2016, BRT, Entitas Anak, telah mengikuti program Pengampunan Pajak dengan penambahan aset sebesar Rp 938.000.000 yang dicatat sebagai bagian dari "Aset lain-lain – pengampunan pajak" di laporan posisi keuangan konsolidasian. Uang tebusan sebesar Rp 18.760.000 telah dibayar BRT pada tanggal 23 September 2016 dan dicatat sebagai bagian dari "Beban pajak" dalam "Beban umum dan administrasi".

Berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak No. KET-2156/PP/WPJ.14/2016 yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 27 September 2016, NKT, Entitas Anak, telah mengikuti program Pengampunan Pajak dengan penambahan aset sebesar Rp 220.000.000 yang dicatat sebagai bagian dari "Aset lain-lain – pengampunan pajak" di laporan posisi keuangan konsolidasian. Uang tebusan sebesar Rp 4.400.000 telah dibayar NKT pada tanggal 23 September 2016 dan dicatat sebagai bagian dari "Beban pajak" dalam "Beban umum dan administrasi".

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT**

Tanggal 30 September 2019

Dan Periode Sembilan Bulan yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan Lain)

17. UANG MUKA PELANGGAN

Akun ini terdiri dari uang muka yang diterima dari pelanggan yang berasal dari penjualan *furnitures, building components* dan *log*:

	30 September 2019	31 Desember 2018
	(Tidak diaudit)	(Diaudit)
<u>Pihak ketiga</u>		
American Woodcraft	-	2.434.111.831
PT Wijaya Tri Utama Plywood		
Indonesia	-	2.240.000.000
Condor Manufacturing Furniture		
Ltd	-	12.106.874.852
PT Pakuwon Permai	-	1.467.680.788
Lain-lain (masing-masing		
di bawah Rp 2 miliar)	862.543.318	3.424.052.923
Jumlah	862.543.318	21.672.720.394

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT**

Tanggal 30 September 2019

Dan Periode Sembilan Bulan yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan Lain)

18. MODAL SAHAM

a. Modal saham

Rincian pemegang saham Perusahaan dan persentase kepemilikannya pada tanggal 30 September 2019 adalah sebagai berikut:

30 September 2019 (Tidak Diaudit)

Pemegang saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Persentase Kepemilikan	Jumlah (Rp)
PT Integra Indo Lestari	4.956.950.000	78,60	495.695.000.000
PT Sinergy Mentari Alam	43.050.000	0,68	4.305.000.000
<i>Direksi/Board of directors</i>			
Halim Rusli	17.000.000	0,27	1.700.000.000
Widjaja Karli	17.000.000	0,27	1.700.000.000
Meity Linlin	5.000.000	0,08	500.000.000
Dra. Syany Tjandra	5.000.000	0,08	500.000.000
Wang Sutrisno	5.000.000	0,08	500.000.000
<i>Komisaris/Board of commisioners</i>			
Hendro Rusli	4.250.000	0,07	425.000.000
Stephanie Kane Ilham	3.000.000	0,05	300.000.000
Masyarakat	1.250.000.000	19,82	125.000.000.000
Jumlah/Total	6.306.250.000	100	630.625.000.000

31 Desember 2018 (Diaudit)

Pemegang saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/	Persentase Kepemilikan	Jumlah (Rp)
PT Integra Indo Lestari	4.956.950.000	78,60	495.695.000.000
PT Sinergy Mentari Alam	43.050.000	0,68	4.305.000.000
<i>Direksi/Board of directors</i>			
Halim Rusli	17.000.000	0,27	1.700.000.000
Widjaja Karli	17.000.000	0,27	1.700.000.000
Meity Linlin	5.000.000	0,08	500.000.000
Dra. Syany Tjandra	5.000.000	0,08	500.000.000
Wang Sutrisno	5.000.000	0,08	500.000.000
<i>Komisaris/Board of commisioners</i>			
Hendro Rusli	4.250.000	0,07	425.000.000
Stephanie Kane Ilham	3.000.000	0,05	300.000.000
Masyarakat	1.250.000.000	19,82	125.000.000.000
Jumlah/Total	6.306.250.000	100	630.625.000.000

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diaktakan dengan akta No. 2 tanggal 4 Juni 2018 oleh notaris Susanti, S.H., M.Kn., Perusahaan menyetujui untuk menerbitkan hak opsi melalui Program Management and Employee Stock Option Plan (MESOP) untuk membeli saham baru Perusahaan sebanyak-banyaknya 187.500.000 saham. Perusahaan menerbitkan program MESOP pada tanggal 24 Mei 2018 (tanggal pemberian) sejumlah 56.250.000 saham. Tujuan program ini untuk mendorong kepemilikan saham Perusahaan oleh peserta program, menyelaraskan tujuan Perusahaan dengan tujuan peserta program yang merupakan manajemen dan pekerja Perusahaan, serta meningkatkan kinerjanya.

Pihak yang memenuhi syarat untuk menerima MESOP adalah dewan direksi, komisaris kecuali komisaris independen dan karyawan tetap dengan mengacu kepada masa kerja, penilaian kinerja, kelompok jabatan dan jabatan.

Berdasarkan akta No. 5 tanggal 17 Februari 2017 oleh notaris Dyah Ayu Ambarwati, S.H., M.Kn., para pemegang saham Perusahaan menyetujui perubahan status Perusahaan dari semula Perseroan Terbuka menjadi Perseroan Tertutup. Akta

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT**

Tanggal 30 September 2019

Dan Periode Sembilan Bulan yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan Lain)

tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0004322.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 21 Februari 2017.

Berdasarkan akta No. 17 tanggal 7 Maret 2017 oleh notaris Fathiah Helmi, S.H., para pemegang saham Perusahaan menyetujui atas:

- Perubahan seluruh anggaran dasar untuk disesuaikan dengan peraturan perundangan di bidang pasar modal;
- Perubahan status Perusahaan dari semula Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka;
- Pengeluaran saham baru yang dikeluarkan dari portfolio yang ditawarkan kepada masyarakat melalui penawaran umum; dan
- Pengeluaran saham baru dalam rangka pelaksanaan rencana opsi saham manajemen dan karyawan (MESOP).

Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0005787.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 8 Maret 2017.

19. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI

Tabel berikut ini menjelaskan komponen dari hak pemegang saham non-pengendali entitas anak pada tanggal 30 September 2019 sebagai berikut:

	30 September 2019	31 Desember 2018
	(Tidak diaudit)	(Diaudit)
PT WoodOne Integra Indonesia*	-	-
PT Inter Kayu Mandiri	3.319.139.980	3.319.204.980
PT Interkraft	2.420.953.189	2.335.812.560
PT Intertrend Utama	1.872.167.435	1.796.143.495
PT Belayan River Timber	1.157.011.137	1.185.704.218
PT Intera Indonesia	417.791.666	346.035.360
PT Narkata Rimba	1.223.603.927	1.139.865.069
PT Integriya Dekorindo	98.041.532	137.508.841
Jumlah	10.508.708.866	10.260.274.523

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYACATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT

Tanggal 30 September 2019

Dan Periode Sembilan Bulan yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan Lain)

20. PENJUALAN BERSIH

	30 September 2019 (Tidak diaudit)	30 September 2018 (Tidak diaudit)
Ekspor		
Manufaktur	1.087.350.447.461	924.836.383.698
Lokal		
Kehutanan	125.896.112.713	184.803.262.519
Manufaktur	160.764.872.748	239.608.655.806
Perdagangan	34.729.019.046	29.659.983.926
Jumlah	1.408.740.451.968	1.378.908.285.949

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT**

Tanggal 30 September 2019

Dan Periode Sembilan Bulan yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan Lain)

21. BEBAN POKOK PENJUALAN

	30 September 2019 (Tidak diaudit)	30 September 2018 (Tidak Diaudit)
<u>Manufaktur dan Kehutanan</u>		
Pemakaian bahan baku	710.074.348.342	389.179.678.186
Upah buruh langsung	201.254.290.491	166.459.513.839
Beban pabrikasi	277.060.510.382	287.700.802.208
Jumlah beban produksi	<u>1.188.389.149.215</u>	<u>843.339.994.233</u>
Barang dalam proses		
Awal tahun	222.698.104.081	126.052.122.425
Kerugian karena terbakar		
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan		
Akhir tahun	<u>(367.973.115.484)</u>	<u>(133.049.041.158)</u>
Jumlah beban pokok produksi	<u>1.043.114.137.812</u>	<u>836.343.075.500</u>
Persediaan barang jadi		
Awal tahun	163.413.383.920	244.685.129.327
Pembelian barang jadi	-	38.190.957.342
Kerugian karena terbakar		
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan		
Akhir tahun	<u>(342.849.433.802)</u>	<u>(236.250.338.963)</u>
Sub-jumlah	<u>863.678.087.930</u>	<u>882.968.823.206</u>
Persediaan dalam perjalanan awal	19.987.155.017	-
Persediaan dalam perjalanan akhir	<u>(3.118.783.796)</u>	<u>-</u>
Sub-jumlah	<u>880.546.459.151</u>	<u>882.968.823.206</u>
<u>Perdagangan</u>		
Persediaan awal	30.819.180.102	22.605.974.230
Pembelian	29.254.359.158	19.472.795.362
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan		
Persediaan akhir	<u>(36.321.065.098)</u>	<u>(22.000.556.330)</u>
Sub-jumlah	<u>23.752.474.162</u>	<u>20.078.213.262</u>
Jumlah beban pokok penjualan	<u>904.298.933.313</u>	<u>903.047.036.468</u>

Tidak terdapat pembelian dari pemasok individual yang melebihi 10% dari jumlah pembelian bersih untuk periode 30 September 2019 dan 2018.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT**

Tanggal 30 September 2019

Dan Periode Sembilan Bulan yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan Lain)

22. BEBAN PENJUALAN DAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Rincian beban penjualan dan umum dan administrasi adalah sebagai berikut

	30 September 2019 (Tidak diaudit)	30 September 2018 (Tidak diaudit)
<u>Beban penjualan</u>		
Kurir dan ekspor	28.728.103.565	17.568.529.600
Gaji dan tunjangan	21.451.604.002	14.526.127.554
Ongkos angkut	12.549.104.552	4.813.672.292
Penyusutan	3.304.896.003	3.537.636.926
Promosi	999.783.043	2.433.798.271
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 2 miliar)	9.869.593.908	16.069.415.635
Jumlah	<u>76.903.085.073</u>	<u>58.949.180.278</u>
<u>Beban umum dan administrasi</u>		
Gaji dan tunjangan	37.469.595.469	43.118.316.211
Jasa manajemen	12.104.859.217	11.970.000.000
Pajak	2.643.411.279	3.676.929.027
Imbalan Kerja	2.131.111.513	7.546.045.131
Penyusutan	7.843.503.723	5.059.763.345
Asuransi	4.195.241.763	4.157.408.325
Jamuan dan sumbangan	1.326.704.333	2.052.133.150
Keperluan kantor	1.245.524.603	1.997.776.318
Sewa	3.910.412.187	8.282.120.313
Jasa profesional	1.798.416.122	1.188.438.041
Perbaikan dan pemeliharaan	1.228.095.510	2.799.629.018
Perjalanan dinas	282.087.819	844.950.643
Transportasi	805.869.236	1.126.973.018
Iuran dan perijinan	124.534.030	152.679.165
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 2 miliar)	2.814.887.534	6.137.642.357
Jumlah	<u>79.924.254.338</u>	<u>100.110.804.062</u>

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 September 2019
Dan Periode Sembilan Bulan yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan Lain)

23. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usaha normal, Kelompok Usaha melakukan transaksi usaha dan non usaha dengan pihak-pihak berelasi.

Transaksi-transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

a. Sifat hubungan dan transaksi

Pihak-pihak berelasi	Hubungan	Jenis transaksi
PT Integra Indo Lestari (IIL)	Parent of the Company	Operasional

IIL memberikan jasa manajemen di bidang akuntansi, keuangan, pajak, sumber daya manusia dan dukungan jasa teknologi informasi kepada Perusahaan, ITR, ITK, NKT, BRT dan INT. Jumlah beban jasa manajemen dari transaksi tersebut dicatat sebagai bagian dari akun "Beban umum dan administrasi" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

24. LABA PER SAHAM DASAR DAN DILUSIAN

Perhitungan laba per saham dasar dan dilusian adalah sebagai berikut:

	30 September 2019 (Tidak Diaudit)	31 Desember 2018 (Diaudit)
Laba tahun berjalan	242.902.268.449	239.266.426.284
Jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar	6.306.250.000	6.264.062.500
Laba per saham dasar dan dilusian	38,52	38,20

25. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

Pada tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018, Kelompok Usaha memiliki aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing sebagai berikut:

	30 September 2019 (Tidak Diaudit)		31 Desember 2018 (Diaudit)	
	Mata Uang Asing	Ekuivalen Rupiah	Mata Uang Asing	Ekuivalen Rupiah
ASET				
Kas dan setara kas	US\$ 1.106.833	12.301.062.169	US\$ 2.564.338	37.134.180.810
	RMB 14.513	29.084.648	RMB 7.526	15.879.294
	SGD 1.519	15.582.373	SGD -	-
	EUR 1.005	15.577.480	EUR -	-
	HKD 1.210	2.187.220	HKD -	-
	THB 0.5	232	THB -	-
Piutang usaha	US\$ 18.583.835	263.407.278.609	US\$ 13.986.256	202.534.977.802
Jumlah		275.770.772.731		239.685.037.906
LIABILITAS				
Utang bank dan lembaga keuangan bukan bank	US\$ 7.000.000	99.218.000.000	US\$ 7.000.000	101.367.000.000
Utang usaha	US\$ 539.773	7.650.741.882	US\$ 115.526	1.671.931.210
	THB -	-	THB 22.500	10.009.913
	RMB 2.186.450	4.381.623.935	RMB -	-
Jumlah		111.250.365.817		103.048.941.123
Aset - bersih		164.520.406.914		136.636.096.783

Aset dan liabilitas moneter di atas dijabarkan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada periode 30 September 2019 dan Tahun 2018.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT

Tanggal 30 September 2019

Dan Periode Sembilan Bulan yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan Lain)
